

SKRIPSI



**RESTITUSI BAGI KORBAN KEJAHATAN
DI KABUPATEN GOWA**

(Suatu Tinjauan Viktimologis)

**OLEH
NAVIRA ARAYA TUEKA
B 111 10 019**

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2014**

HALAMAN JUDUL

**RESTITUSI BAGI KORBAN KEJAHATAN DI KABUPATEN GOWA
(SUATU TINJAUAN VIKTIMOLOGIS)**

**Oleh :
NAVIRA ARAYA TUEKA
B 111 10 019**

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi
Program Sarjana Dalam Program Kekhususan Hukum Pidana
Studi Ilmu Hukum**

Pada

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2014**

PENGESAHAN SKRIPSI

**RESTITUSI BAGI KORBAN KEJAHATAN
DI KABUPATEN GOWA**

(Suatu Tinjauan Viktimologis)

Disusun dan diajukan oleh

**NAVIRA ARAYA TUEKA
B 111 10 019**

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Kamis 30, Januari 2014
Dan Dinyatakan Diterima

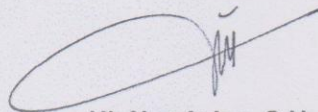
Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.
NIP. 19590317 198703 1 002

Sekretaris



Hj. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 19671010 199202 2 002

**An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,**



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Navira Araya Tueka

Nim : B111 10 019

Bagian : Hukum Pidana

Judul : Restitusi bagi Korban Kejahatan di Kabupaten Gowa
(Suatu Tinjauan Viktimologis)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Desember 2013

Mengetahui :

Pembimbing I



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.
NIP. 19590317 198703 1 002

Pembimbing II



Hj. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 19671010 199202 2 002

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **Navira Araya Tueka**
Nomor Induk : B111 10 019
Bagian : Hukum Pidana
Judul skripsi : Restitusi Bagi Korban Kejahatan di Kabupaten
Gowa (Suatu Tinjauan Viktimologis)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
Program Studi.

Makassar, Desember 2013

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



1 Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

ABSTRAK

NAVIRA ARAYA TUEKA (B 111 10 019). Dengan judul “ **Restitusi Bagi Korban Kejahatan di Kabupaten Gowa (Suatu Tinjauan Viktimologis)**”. Di bawah bimbingan Prof. Dr. Muhadar, S.H.,M.H selaku Pembimbing I dan Hj. Nur Azisa, S.H.,M.H selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dapat ditempuh oleh korban kejahatan dalam rangka pemenuhan haknya untuk mendapatkan restitusi dan untuk mengetahui hambatan yang menjadi kendala dalam upaya pemenuhan restitusi bagi korban kejahatan di Kabupaten Gowa.

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) dan metode penelitian lapangan (field research) yang dilaksanakan di Polres Gowa dan Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan mengambil berkas untuk mengetahui upaya yang dapat ditempuh oleh korban kejahatan, proses mediasi dan hambatan yang dihadapi dalam upaya pemenuhan restitusi bagi korban kejahatan. Selain itu, penulis juga menyebarkan kuesioner responden ke beberapa korban kejahatan dan mewawancarai pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan masalah yang dibahas, yaitu kepada Kepala Kasat Reskrim Polres Gowa serta Hakim Pengadilan Negeri sungguminasa. Penulis juga melakukan pengumpulan data berkenaan dengan objek penelitian dan menelaah buku-buku serta literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

Hasil yang diperoleh penulis dari penelitian ini, antara lain : 1.Upaya yang dilakukan oleh korban kejahatan dalam rangka pemenuhan haknya untuk mendapatkan restitusi, yakni melalui mediasi (jalan kekeluargaan) antara pelaku dan korban yang dibantu oleh pihak kepolisian. 2. Hambatan yang dihadapi oleh korban kejahatan dalam pemenuhan restitusi di Kabupaten Gowa, antara lain ketidaktahuan masyarakat awam terkait haknya untuk mendapatkan restitusi akibat kejahatan yang dialaminya dapat ditempuh dengan penggabungan perkara dalam proses di pengadilan, korban merasa sulit untuk menempuh proses tersebut dikarenakan terlalu berbelit-belit dan memakan waktu yang lama.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah atas segala nikmat, berkah, rahmat, taufik, serta kekuatan yang telah diberikan Allah *Subhanahuwata'ala* sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam untuk tuntunan dan suri tauladan Rasulullah *Shallallahu'alaihiwa sallam* beserta keluarga dan sahabat beliau yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai islam yang sampai saat ini dapat dinikmati oleh seluruh manusia di penjuru dunia.

Skripsi ini merupakan tugas akhir demi memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dengan judul skripsi “Restitusi Bagi Korban Kejahatan di Kabupaten Gowa (Suatu Tinjauan Viktimologis)”.

Terselesainya skripsi ini tentunya tak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak selama penulis menempuh pendidikan, penelitian serta penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, sudah sepatutnya bila penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan kepada :

Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada kedua orangtua tercinta, Ayahanda Ir. Nasruddin Tueka dan Ibunda Selvia Salim atas segala jerih payah, curahan kasih sayang, bimbingan dan motivasi serta doa yang tulus dan takhenti-hentinya

memberikan banyak pengorbanan baik materiil maupun non materiil kepada penulis dari lahir hingga saat ini.

Dengan segala hormat dan kerendahan hati, Penulis sampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S dan Hj. Nur. Azisa, S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang telah berkenan memberikan waktu luang serta perhatian ditengah kesibukan beliau. Atas bimbingan, saran, ilmu yang sangat berharga serta kesabaran dalam proses bimbingan dari beliau sekalian.

Ucapan terima kasih Penulis sampaikan Kepada :

1. Bapak Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi, Sp.B., Sp.BO, selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh staf dan jajarannya;
2. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., D.F.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Bapak Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin serta Bapak Romi Librayanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Romi Librayanto, S.H., M.H. selaku Penasihat akademik penulis yang memberikan saran dalam setiap konsultasi Kartu Rencana Studi (KRS).

5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin untuk segala ilmu dan bimbingan yang telah diberikan selama proses perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan studi.
6. Bapak Prof.Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H, Bapak H. M Imran Arief, S.H., M.H, Ibu Hj. Haeranah, S.H., M.H dan Ibu Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H selaku dosen penguji dan penguji pengganti yang telah memberikan masukan dan saran-sarannya kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,MH dan Bapak Abd. Asis, S.H.,MH yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis
8. Seluruh Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan bantuan dalam pengurusan berkas kuliah hingga berkas ujian skripsi.
9. Staff Administrasi perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Kakak Afiah Mukhtar, S.Pd dan Ibu Nurhidayah, S. Hum atas kesempatan yang diberikan untuk meminjam referensi yang dibutuhkan Penulis dalam penyusunan skripsi ini.
10. Kepada Kepolisian Resor Kabupaten Gowa beserta staff dan jajarannya yang telah membantu Penulis selama proses penelitian.

11. Keempat kakakku. Vemmy, Vanny, Vera dan Verly yang telah memberikan kebaikan, dorongan dan semangat dalam hidup Penulis. Segenap cinta dan kasih sayang Penulis sampaikan terima kasih.
12. Para kakak senior yang Penulis kagumi Kak Asrianto, S.H., Kak Onna Bustang, S.H., Kak Fadhil, S.H., Kak Zaldi, S.H., Kak Andi Iswan Randie, S.H., Kak Safril, S.H., Kak Irfan Marhaban, S.H., Kak Haeril Akbar, S.H., Kak Tizar Adhyatma, S.H., Kak Nur Ikhsan Fiandy, S.H., Kak Akmal Lageranna, S.H., Kak Dian Anugerah Abunaim, S.H., Kak Dian Utami Mas Bakar, S.H., Kak Etyka Agriyani, S.H., Kak Siti Nurlin, S.H., Kak Firda, S.H., Kak Andi Djuari, S.H.,
13. Saudara-saudaraku Zakiah, S.H., Sutriani Sudarman, S.H., St. Hatijah, S.H., Dewiyanti Ratnasari, S.H., Siti Hardianti Rahman, S.H., Kattya Nusantara Putri, S.H., Mutiah Sari, S.H., Waode Dwirahayu Merdeka Wati, Andi Anisa Agung, S.H., Andi Annisa, Dziqra Mauliana, Zulkifli Mukhtar, S.H., Ridwan Saleh, S.H., Muchtadin Al Attas, S.H., Adi Suriadi, S.H., Jumardi, S.H., Nurdiansyah, Muh. Ikram Nur Fuady, S.H. dan Zulfikar Terima Kasih atas segala dukungan, motivasi, kasih sayang, persaudaraan, suka-duka dan kesetiakawanan kalian selama ini
14. Sahabat terkasih Nurul Wulan Sari, Ratih Anggeraini, Puji Pratiwi Putri dan Yusni Hastuti yang selalu memberikan dukungan dan senantiasa menemani Penulis untuk berbagi pengalaman.

15. Teman-temanku Muh. Aril Surya Ananda, S.H, Arini Nur Anisa, S.H, H.Syafaat Anugrah, S.H, Andi Ulfah Tiara Patunru, Riska Reskika, S.H, Tisa, S.H, Basri, Audy Rahmat, Haidir Ali, S.H, Nur Setiawan, Syahrul Nawir Nur, Ardiasnyah Aksan, Yeni, Aci yang selalu memberikan semangat
16. Kakak, teman dan adik di Asian Law Students Association Local Chapter Universitas Hasanuddin Priode 2010-2011. 2011-2012 dan 2012-2013
17. Para Sahabat Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Basketball Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
18. Tim National Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada Moot Court Competition (MCC) Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tingkat Perguruan Tinggi Se-Indonesia, Jakarta pada Tahun 2011 Kak Onna Bustang, S.H., Kak Haeril Akbar, S.H., Kak Asrianto, S.H., Kak Dian Anugerah Abunaim, S.H., Kak Siti Nurlin, S.H., Kak Eka, S.H., Kak Lastri, S.H., Kak Gina Mangala, S.H., Kak Jihad, S.H., Kak Pratiwi, S.H., Kak Ventus, S.H., Kak Panji, S.H., Dewiyanti Ratnasari, S.H, Andi Anisa Agung, S.H, Waode Dwirahayu MW, Emi Humairah Hamzah, S.H, Junaedi Azis, S.H, Dio Alifiansyah, Fahri Ibrahim, Ancha, Irfan atas kebaikan hati dan kerelaan menjadikan Penulis bagian dari keluarga besar tim kalian. Terima kasih atas perjuangan, semangat dan segala keuntungan yang Penulis telah dapatkan dari tim kalian.

19. Tim Nasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada Moot Court Competition (MCC Bulaksumur) Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Tahun 2012 : Kak Nursal, S.H., Kak Fadil, S.H., Kak Iswan, S.H., Kak Zaldi, S.H., Kak Irfan, S.H., Kak Vita, S.H., Kak Inul, Audy Rahmat, Inayah, Adong, Nurdiansyah, Nur Setiawan, Fadlan, Juwita, Dian, Ismi, Anty, Dwi, Zakiah, S.H dan Dewiyanti Ratnasari, S.H terima kasih telah memberikan kesempatan Penulis untuk mendapatkan ilmu dan pelajaran yang sangat berharga di tim kalian.
20. Seluruh Teman Legitimasi Angkatan 2010 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
21. Sahabat seperjuangan dari Mahasiswa Baru hingga sekarang Muh. Aril Surya Ananda, S.H, H.Syafaat Anugrah, S.H, Amiruddin, Muh Akram Putra, Arini Nur Anisa, S.H, Lestari Wulandari, Asmawaty, Rabiatul Adawiyah, Maryam, Fitri dan Seluruh Teman-teman kelas A dari semester I hingga semester IV terima kasih telah menjadikan teman yang setia kawan
22. Saudaraku KKN Reguler Universitas Hasanuddin Angkatan 85, Kec. Binuang, Kab. Polman terkhusus Beppa Nurwahyda, Drg.A. Dewi Permatasari, Darma, Randy, Ramadhan, Azlan dan Ashar yang senantiasa memberikan semangat dan dukungannya;
23. Rekan kerja dan magang di Direktorat Asia Selatan dan Tengah, Kementerian Luar Negeri Direktorat Asia Selatan dan Tengah Ibu Listyowati, Bapak Tri Surya, Bapak Leonard, Mas Tio, Mas Bowo,

Mas Aris, Mas Dani, Mas T. Rigo , Mba Ratih yang selalu memberikan semangat

24. Teman-teman Semasa SMA yang selalu memberikan semangatnya;

25. Adik-adikku Nursakinah yang senangtiasa menemani dalam masa penelitian hingga skripsi , Andi Dettia Cawa, Dede Khairunnisa, Rini Ariani Said, Adini Tahira, Juwita Permata Hati, lin , Tojiwa Ram, Rahmi serta adik-adikku angkatan 2011-2013 yang selalu memberikan semangat

26. Serta seluruh sahabat dan teman yang tidak dapat Penulis tuliskan namanya satu per satu terima kasih atas dukungan dan semangatnya.

Dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati Penulis menyadari bahwa karya ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT dan kekurangan hanya ada pada diri setiap makhluk ciptaan-Nya. Maka dari itu saran dan kritik yang bersifat konstruktif sangat Penulis harapkan demi kelayakan dan kesempurnaan kedepannya agar dapat diterima secara penuh oleh khalayak umum yang berminat terhadap karya ini.

Makassar, 30 Januari 2014

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 10
A. Viktimologi	10
1. Definisi Viktimologi	11
2. Ruang Lingkup Viktimologi	13
3. Manfaat Viktimologi	14
B. Korban	17

1. Definisi Korban	17
2. Tipologi Korban	23
C. Kejahatan	26
1. Definisi Kejahatan	26
2. Penggolongan (Klasifikasi) Kejahatan	31
D. Restitusi	34
1. Definisi Restitusi	35
2. Dasar Hukum Restitusi	37
3. Mekanisme Pemberian Restitusi bagi Korban ..	42
BAB III METODE PENELITIAN	57
A. Lokasi Penelitian	57
B. Teknik Pengumpulan Data	57
C. Jenis dan Sumber Data	58
D. Teknik Analisis Data	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Upaya Korban Kejahatan Dalam Rangka Pemenuhan Haknya Untuk Mendapatkan Restitusi di Kabupaten Gowa ..	60
B. Faktor-Faktor Yang Menghambat Upaya Pemberian Restitusi bagi Korban di Kabupaten Gowa	81

BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat sering kali terjadi berbagai hal yang memicu pelanggaran hukum sebagai akibat dari upaya pemenuhan kebutuhan yang kadangkala begitu mendesak untuk segera diwujudkan. Manusia terkadang tidak menyadari bahwa apa yang dia lakukan telah bertentangan dengan peraturan yang ada. Hal ini biasa terjadi akibat kurangnya pemahaman terhadap hukum-hukum yang berlaku. Di sisi lain juga tidak dapat dipungkiri, ada kalanya hukum dan peraturan yang ada tidak atau kurang memihak terhadap kepentingan masyarakat.

Adanya dua hal antara kekurangpahaman masyarakat terhadap peraturan yang ada serta tidak/kurang berpihaknya peraturan yang ada terhadap masyarakat tersebut menimbulkan kerugian ganda sehingga sering kali masyarakat menjadi korban dari suatu kejahatan dalam arti kurangnya perlindungan hukum terhadap korban kejahatan.

Dengan terjadinya suatu tindak pidana, sasaran perhatian orang sering kali lebih terfokus kepada pelaku, sehingga mengakibatkan luputnya perhatian terhadap korban. Demikian juga jika kita melihat dalam perundang-undangan yang ada selama ini, lebih banyak memuat perhatian terhadap pelaku, bagaimana supaya suatu peristiwa pidana dapat dituntaskan dengan memeriksa dan memproses pelaku untuk mempertanggungjawabkan

peristiwa pidana yang dia lakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan telah ditangkap, ditahan dan kemudian berujung pada dihukumnya pelaku seolah-olah selesailah tanggung jawab aparat penegak hukum dan pemerintah, sementara bagaimana penderitaan korban akibat peristiwa pidana yang terjadi tadi luput dari perhatian.

Perlindungan korban kejahatan dalam sistem hukum nasional nampaknya belum memperoleh perhatian serius. Hal ini terlihat dari masih sedikitnya hak-hak korban kejahatan memperoleh pengaturan dalam perundang-undangan nasional. Adanya ketidakseimbangan antara perlindungan korban dengan pelaku kejahatan pada dasarnya merupakan salah satu pengingkaran dari asas setiap warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sebagai landasan konstitusional. Selama ini muncul pandangan yang menyebut pada saat itulah perlindungan terhadap korban telah diberikan, padahal pendapat demikian tidak sepenuhnya benar.

Melalui penelusuran berbagai literatur, penulis mencoba untuk melihat bagaimana seharusnya korban kejahatan memperoleh perlindungan hukum serta bagaimana sistem hukum nasional selama ini mengatur perihal perlindungan kepada korban kejahatan. Dalam beberapa perundang-undangan nasional permasalahan perlindungan korban kejahatan memang

sudah diatur namun sifatnya masih parsial dan tidak berlaku secara umum untuk semua korban kejahatan.

Dengan adanya berbagai permasalahan mengenai jenis korban dalam kehidupan masyarakat, maka inilah yang melarbelakangi lahirnya cabang ilmu baru yang disebut dengan “viktimologi”. Viktimologi atau victimology (istilah dalam bahasa Inggris) berasal dari istilah Latin, yaitu “*vitima*” yang berarti korban, sedangkan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan. Maka secara singkat, viktimologi adalah ilmu yang mempelajari korban dari berbagai aspek.

Walaupun, disadari bahwa korban-korban kejahatan itu, disatu pihak dapat terjadi karena perbuatan/tindakan seseorang (orang lain), seperti korban pencurian, pembunuhan, dan sebagainya (yang lazimnya disebut sebagai korban kejahatan), dan dilain pihak, korban dapat pula terjadi oleh peristiwa alam yang berada di luar “jangkauan” manusia (yang lazimnya disebut sebagai korban bencana alam), yaitu seperti korban letusan gunung berapi, korban banjir, korban gempa bumi dan lain-lain.

Pengertian korban yang mendasari lahirnya kajian viktimologi, pada awalnya hanya terbatas pada korban kejahatan. Maka atas dasar ini pulalah, tanpa mengecilkan arti dari upaya pengkajian jenis korban selain dari korban kejahatan dalam tulisan ini hanya difokuskan pada jenis korban yang timbul sebagai akibat dari pelanggaran terhadap ketentuan tertentu hukum pidana materiil, yang lazimnya seperti yang disebutkan di atas disebut sebagai

korban kejahatan. Korban dalam konteks ini merupakan korban dalam pengertian yang konvensional dan sekaligus sebagai cikal bakal yang menjadi objek kajian pada awal lahirnya viktimologi (klasik).

Setiap terjadi kejahatan maka dapat dipastikan akan menimbulkan kerugian pada korbannya. Korban kejahatan menanggung kerugian karena kejahatan, baik materiil maupun immateriil. Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan tidak dipedulikan (Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2006 : 24).

Dalam penyelesaian perkara pidana, sering kali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan, sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah : “Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban.

Dalam penyelesaian perkara pidana, banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya immaterial maupun materiil. Korban kejahatan ditempatkan sebagai alat bukti yang memberikan keterangan yaitu sebagai saksi sehingga kemungkinan bagi korban untuk memperoleh kekeluasaan

dalam memperjuangkan haknya kecil. Korban tidak diberikan kewenangan dan tidak terlibat secara aktif dalam proses penyidikan dan persidangan sehingga ia kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-haknya dan memulihkan keadaannya akibat suatu kejahatan.

Tidak jarang juga ditemukan korban mengalami penderitaan (fisik, mental atau materiil) akibat dari suatu tindak pidana yang menimpa dirinya, tidak mempergunakan hak-hak yang seharusnya dia terima karena berbagai alasan, misalnya korban menolak untuk mengajukan ganti kerugian karena dikhawatirkan prosesnya akan menjadi semakin panjang dan berlarut-larut yang dapat berakibat pada timbulnya penderitaan yang berkepanjangan.

Salah satunya bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dan merupakan hak dari seseorang yang menjadi korban tindak pidana adalah untuk mendapatkan restitusi.

Sebagai sebuah terobosan yang lahir dari konsep keadilan restorative, restitusi merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana sebagai pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan akibat terjadinya suatu tindak pidana. Sejatinya pendekatan keadilan restorative dalam hukum pidana bukan bertujuan mengabolisi hukum pidana atau melebur hukum pidana dan hukum perdata. Pendekatan keadilan restorative justru mengembalikan fungsi hukum pidana pada jalurnya semula, yaitu pada fungsi ultimum remedium.

Tentu, dalam tataran praktis, penanganan dan penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restorative menawarkan alternative jawaban atas sejumlah masalah yang dihadapi dalam sistem peradilan pidana. Penggabungan perkara gugatan ganti kerugian seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 98 KUHAP merupakan salah satu bentuk riil evolusi transformasi gagasan keadilan restorative ke dalam hukum positif di Indonesia.

Namun, mengutip sistem yang telah dipraktekkan di Negara-negara Eropa, Amerika dan Asia, pengaruh gagasan keadilan restorative justru semakin terlihat setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang ini memberikan legitimasi secara hukum kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk dapat menjalankan amanah agar korban dan saksi dapat memperoleh keadilan serta perlindungan dalam setiap tahapan peradilan pidana.

Namun, kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana saat ini belum ditempatkan secara adil bahkan cenderung terlupakan. Korban-korban kejahatan hanya ditempatkan sebagai alat bukti yang memberikan keterangan, yaitu hanya sebagai saksi, sehingga kemungkinan bagi korban untuk memperoleh keleluasaan dalam memperjuangkan haknya adalah kecil. Apabila dipandang dari sudut Perlindungan Hak Asasi Manusia, maka

perlindungan terhadap korban kejahatan dalam proses peradilan pidana merupakan suatu hal yang mutlak.

Seperti diketahui, salah satu instrument penting yang menjadi landasan untuk memenuhi kewajiban pemulihan atau reparasi terhadap korban adalah Prinsip-prinsip Dasar dan Pedoman Hak Atas Pemulihan untuk Korban Pelanggaran Hukum HAM Internasional dan Hukum Humaniter (*Basic principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Violations of International Human Rights and Humanitarian Law* 1995); serta Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*).

Untuk mewujudkan perlindungan yang benar terhadap korban kejahatan demi terciptanya keadilan yang sejati bukanlah hal yang gampang apalagi berbagai hambatan yang ada dalam penyelenggaraan perlindungan korban kejahatan. Belum lagi berbagai aspek lainnya yang meliputi korban, tentulah membutuhkan pembahasan lebih lanjut.

Hal inilah yang melatarbelakangi sehingga penulis tertarik mengangkat dan memilih judul :

“ RESTITUSI BAGI KORBAN KEJAHATAN DI KABUPATEN GOWA (Suatu Tinjauan Viktimologis) “.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah upaya korban kejahatan dalam rangka pemenuhan haknya untuk mendapatkan restitusi di Kabupaten Gowa ?
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat upaya pemberian restitusi bagi korban di Kabupaten Gowa ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum yang dapat ditempuh oleh korban kejahatan dalam pemenuhan haknya mendapatkan restitusi.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat upaya pemberian restitusi bagi korban kejahatan di Kabupaten Gowa.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis yaitu ingin memberikan sumbangan yang berarti dan menambah khasanah ilmu pengetahuan berkaitan dengan korban khususnya hak-hak atas ganti kerugian berupa restitusi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam mengambil kebijakan publik terutama berkaitan dengan masalah korban kejahatan pada

umumnya, khususnya dalam memahami proses restitusi bagi korban kejahatan di Kabupaten Gowa.

- b. Bagi pribadi penulis, penelitian ini merupakan langkah awal untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Viktimologi

Apabila hendak menemukan upaya penanggulangan kejahatan yang tepat, cara pandang kita sebaiknya tidak hanya terfokus pada berbagai hal berkaitan dengan penyebab timbulnya kejahatan atau metode apa yang efektif dipergunakan dalam penanggulangan kejahatan. Namun, hal ini yang tidak kalah pentingnya untuk dipahami adalah masalah korban kejahatan itu sendiri yang dalam keadaan-keadaan tertentu dapat menjadi pemicu munculnya kejahatan.

Pada saat berbicara tentang korban kejahatan, cara pandang kita tidak dapat dilepaskan dari viktimologi. Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti: faktor penyebab munculnya kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak dan kewajiban korban kejahatan.

Viktimologi dapat dikatakan sebagai cabang ilmu yang relatif baru jika dibandingkan dengan cabang ilmu lain, seperti sosiologi dan kriminologi. Sekaligus usianya relatif muda, namun peran viktimologi tidak rendah dibandingkan dengan cabang-cabang ilmu yang lain, dalam kaitan pembahasan mengenai fenomena sosial (Mansur, 2006 : 33).

1. Definisi Viktimologi

Menurut Gosita (1993 : 65) viktimologi merupakan istilah yang berasal dari bahasa inggris "*victimology*" yang berasal dari kata latin yaitu "*victim*" yang berarti korban dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan ilmiah.

Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial (Widiyanti dan Yulius, 1987 : 68)

Korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas karena tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian, tetapi juga kelompok, korporasi, swasta maupun pemerintah sedangkan yang dimaksud dengan akibat penimbunan korban adalah sikap atau tindakan terhadap korban dan/atau pihak pelaku serta mereka yang secara langsung atau tidak terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan.

Sejalan dengan semakin berkembangnya viktimologi sebagai cabang ilmu baru, berkembang pula berbagai rumusan tentang viktimologi. Kondisi ini hendaknya tidak dipandang sebagai pertanda tidak adanya pemahaman yang seragam mengenai ruang lingkup viktimologi, tetapi harus dipandang sebagai bukti bahwa viktimologi akan selalu berkembang sejalan dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat (Mansur, 2006 : 34)

Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial (Gosita, 1993 :40).

Perumusan ini membawa akibat perlunya suatu pemahaman, yaitu :

- 1) Sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional;
- 2) Sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interrelasi antara fenomena yang ada dan saling memengaruhi;
- 3) Sebagai tindakan seseorang (individu) yang dipengaruhi oleh unsur struktur sosial tertentu suatu masyarakat tertentu.

Pada dasarnya, perkembangan ilmu pengetahuan tentang korban kejahatan (viktimologi) tidak dapat dipisahkan dari lahirnya pemikiran-pemikiran brilian dari Hans von Hentig, seorang ahli kriminologi pada tahun 1941 serta Mendelsohn, pada tahun 1947. Pemikiran kedua ahli ini sangat memengaruhi setiap fase perkembangan viktimologi.

Perkembangan viktimologi hingga pada keadaan seperti sekarang tentunya tidak terjadi dengan sendirinya, namun telah mengalami berbagai perkembangan yang dapat dibagi dalam tiap fase.

Pada tahap pertama, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja, pada fase ini dikatakan sebagai "*penal or special victimology*." Sementara itu, pada fase kedua, viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan, tetapi juga meliputi korban kecelakaan. Pada fase ini disebut sebagai "*general victimology*." Fase ketiga, viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi, yaitu mengkaji permasalahan korban karena

penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia. Fase ini dikatakan sebagai “*new victimology*.”

Dari pengertian di atas, tampak jelas bahwa yang menjadi objek pengkajian dari viktimologi, diantaranya: pihak-pihak mana saja yang terlibat/memengaruhi terjadinya suatu viktimisasi (kriminal), bagaimanakah respons terhadap suatu viktimisasi kriminal, faktor penyebab terjadinya viktimisasi kriminal bagaimanakah upaya penanggulangannya dan sebagainya.

2. Ruang Lingkup Viktimologi

Objek studi atau ruang lingkup perhatian viktimologi sebagai berikut :

- 1) Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalisasi;
- 2) Teori-teori etiologi viktimisasi kriminal;
- 3) Para peserta yang terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimisasi kriminal atau kriminalitas. Seperti: para korban, pelaku, pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, hakim, pengacara, dan sebagainya;
- 4) Reaksi terhadap suatu viktimisasi kriminal;
- 5) Respons suatu viktimisasi kriminal; argumentasi kegiatan-kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi, usaha-usaha prevensi, represi, tidak lanjut (ganti kerugian) dan pembuatan peraturan hukum yang berkaitan;
- 6) Faktor-faktor viktimogen/kriminogen.

Ruang lingkup perhatian atau objek studi Viktimologi dan Kriminologi dapat dikatakan adalah sama. Yang berbeda adalah titik total pengamatannya dalam memahami suatu viktimisasi kriminal. Yaitu, Viktimologi dari sudut pihak korban sedangkan Kriminologi dari sudut pihak pelaku. (Gosita, 1993 : 41)

3. Manfaat Viktimologi

Setelah memahami bagaimana awal perkembangan keilmuan viktimologi dan siapa korban, maka tahap berikutnya perlu kita mengetahui bagaimana manfaat keilmuan viktimologi sebagai bahan pemikiran dan pemahaman dalam upaya perlindungan terhadap korban, yang mana hal ini ditunjukkan bagi calon penegak hukum (mahasiswa) atau bahkan bagi penegak hukum itu sendiri (praktisi, polisi, hakim, jaksa) bahkan pembuat kebijakan.

Arif Gosita (1993 : 41-43), merumuskan beberapa manfaat dari studi mengenai korban antara lain:

- 1) Dengan viktimologi akan dapat diketahui siapa korban, hal-hal yang dapat menimbulkan korban, viktimasi dan proses viktimisasi;
- 2) Viktimologi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial. Tujuannya, tidaklah untuk menyanjung (*eulogize*) korban, tetapi hanya untuk memberikan beberapa

penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban serta hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain;

- 3) Viktimologi memberikan keyakinan, bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan, pekerjaan mereka. Terutama dalam bidang penyuluhan dan pembinaan untuk tidak menjadi korban struktural atau non struktural.
- 4) Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung, misalnya : efek politik pada penduduk “dunia ketiga” akibat penyuapan oleh suatu korporasi internasional, akibat-akibat sosial pada setiap orang akibat polusi industry, terjadinya viktimisasi ekonomi, politik dan sosial setiap kali seorang pejabat menyalahgunakan jabatan dalam pemerintahan untuk keuntungan sendiri;
- 5) Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian viktimisasi kriminal, pendapat-pendapat viktimologi dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal.

Uraian di atas pada dasarnya ada tiga hal pokok berkenaan dengan manfaat studi tentang korban yaitu:

1. manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak korban dan perlindungan hukum;
2. manfaat yang berkenaan dengan penjelasan tentang peran korban dalam suatu tindak pidana;
3. manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban.

Lebih spesifik lagi menurut Mansur dan Gultom (2006 : 65-66) memberikan gambaran manfaat bagi pihak penegak hukum, sebagai berikut ;

“Bagi aparat kepolisian, viktimologi sangat membantu dalam upaya penanggulangan kejahatan. Melalui viktimologi akan mudah diketahui latar belakang yang mendorong terjadinya kejahatan, seberapa besar peranan korban pada terjadinya kejahatan, bagaimana modus operandi yang biasanya dilakukan oleh pelaku dalam menjalankan aksinya serta aspek-aspek lainnya yang terkait.

Bagi Kejaksaan, khususnya dalam proses penuntutan perkara pidana di pengadilan, viktimologi dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya tuntutan yang akan diajukan kepada terdakwa, mengingat dalam praktiknya sering dijumpai korban kejahatan turut menjadi pemicu terjadinya kejahatan.

Bagi hakim tidak hanya menempatkan korban sebagai saksi dalam persidangan suatu perkara pidana, tetapi juga turut memahami kepentingan dan penderitaan korban akibat dari sebuah kejahatan atau tindak pidana, sehingga apa yang menjadi harapan dari korban terhadap pelaku sedikit banyak dapat terkonkritisasi dalam putusan hakim.

Akhirnya, viktimologi dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam upaya memperbaiki berbagai kebijakan/perundang-undangan yang selama ini terkesan kurang memerhatikan aspek perlindungan korban.

B. Korban

1. Definisi Korban

Pentingnya definisi korban diberikan dalam pembahasan ini adalah untuk sekedar membantu dalam menentukan secara jelas batas-batas yang dimaksud oleh definisi tersebut sehingga diperoleh kesamaan secara pandang.

Korban suatu kejahatan tidak selalu harus berupa individu, atau orang perorangan, tetapi biasa juga badan hukum. Bahkan pada kejahatan tertentu, korban biasa juga berasal dari bentuk kehidupan lainnya seperti tumbuh-tumbuhan, hewan atau ekosistem. Korban semacam ini lazim kita temui dalam kejahatan terhadap lingkungan. Namun dalam pembahasan ini korban sebagaimana dimaksud terakhir tidak termasuk didalamnya. (Mansur & Gultom, 2006 :45-47)

Dalam perspektif ilmu pengetahuan hukum pidana lazimnya pengertian “korban kejahatan” merupakan terminology disiplin ilmu kriminologi dan viktimologi yang kemudian dikembangkan dalam sistem peradilan pidana. Dikaji dari perspektif ilmu viktimologi, definisi korban dapat diklasifikasikan secara luas dan sempit. Dalam pengertian luas korban

diartikan sebagai orang yang menderita atau dirugikan akibat pelanggaran baik bersifat pelanggaran hukum pidana (penal) maupun diluar hukum pidana (non penal) atau dapat juga termasuk korban penyalahgunaan kekuasaan (*victim abuse of power*). Sedangkan pengertian korban dalam artian sempit dapat diartikan sebagai *victim of crime* yaitu korban kejahatan yang diatur dalam ketentuan hukum pidana. (Mulyadi, 2012 : 157)

Dari perspektif ilmu viktimologi tersebut diatas, korban dapat diklasifikasikan secara global menjadi :

1. Korban kejahatan (*victims of crime*) sebagaimana termaktub dalam ketentuan hukum pidana sehingga pelaku (*offender*) diancam dengan penerapan sanksi pidana. Pada konteks ini maka korban diartikan sebagai penal victimology dimana ruang lingkup kejahatan meliputi kejahatan tradisional, kejahatan kerah putih (*white collar crimes*), serta *victimless crimes* yaitu viktimasi dalam korelasinya dengan penegak hukum, pengadilan dan lembaga permasyarakatan;
2. Korban akibat penyalahgunaan kekuasaan (*victims abuse of power*). Pada konteks ini maka lazim disebut dengan terminology *political victimology* dengan ruang lingkup *abuse of power*, Hak Asasi Manusia (HAM) dan terorisme;
3. Korban akibat pelanggaran hukum yang bersifat administratif atau yang bersifat *non penal* sehingga ancaman sanksinya adalah sanksi

yang bersifat administratif bagi pelakunya. Pada konteks ini lazimnya ruang lingkupnya bersifat *economic victimology*, dan

4. Korban akibat pelanggaran kaidah sosial dalam tata pergaulan bermasyarakat yang tidak diatur dalam ketentuan hukum sehingga sanksinya bersifat sanksi sosial atau sanksi moral. (Mulyadi, 2012 :157-158).

Pengertian korban kejahatan berkaitan erat dengan sifat kejahatan itu sendiri. Korban kejahatan pada mulanya hanya diartikan sebagai korban kejahatan yang bersifat konvensional, misalnya pembunuhan, perkosaan, penganiayaan, dan pencurian. Kemudian diperluas pengertiannya menjadi kejahatan yang bersifat non konvensional seperti: terorisme, pembajakan, perdagangan narkoba, kejahatan terorganisir, kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*), penyalahgunaan kekuasaan dan lain-lain. Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan baik oleh para ahli maupun bersumber dari konvensi-konvensi internasional yang membahas mengenai korban kejahatan, sebagian diantaranya adalah sebagai berikut : Arif Gosita (Mansur & Gultom, 2006 :46), menurut beliau korban diartikan sebagai, “mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang dirugikan.

Menurut Ralph de Sola (1998 : 188) mengartikan korban (victim) adalah *"... person who has injured mental or physical suffering, loss of property or death resulting from an actual or attempted criminal offense committed by another"*

Menurut Cohen, korban adalah *"... whose pain and suffering have been neglected by the state while it spends immense resources to hunt down and punish the offender who responsible for that pain and suffering"*

Zvonimir Paul Separovic (J.E.Sahetapy, 1995: 199-200), mengartikan korban sebagai *"...those person who are threatened, injured or destroyed by an act or omission of another (man, structure, organization, or institution) and consequently; a victim would be anyone who has suffred from or been threatened by a punishable act (not only criminal act but also other punishable acts as misdemeanors, economic offences, non fulfillment of work duties) or from an accidents. Suffering mat be caused by another man or another structure, where people are also involved"*.

Dari pengertian tersebut, jelas bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan karena sesuatu hal yang meliputi orang lain, instansi atau lembaga dan struktur. Yang dapat menjadi korban tidak hanya manusia saja, tetapi dapat pula korporasi, negara, asosiasi, keamanan, dan agama. dari paparan diatas dapat diketahui bahwa siapa saja dapat menjadi dan/atau menimbulkan korban. Dengan kata lain, semua manusia potensial untuk

menjadi korban. Sebaliknya, pula semua orang dapat, menimbulkan korban.(Muhadar, 2013 : 20-21)

Berdasarkan ketentuan angka I dalam *United Nations Declaration on the Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, pada tanggal 6 September 1985 dari Perserikatan Bangsa-Bangsa Deklarasi Nomor A/Res/40/34 tahun 1985, korban dijelaskan sebagai : “*Victims means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment or their fundamental rights, through acts or omission of criminal laws operative within Member States, including those laws proscribing criminal abuse of power*” (Korban adalah orang-orang baik secara individual maupun kolektif yang menderita kerugian baik secara fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau kerusakan substansial dari hak-hak asasi mereka, yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu negara, termasuk peraturan-peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan).

Dengan mengacu pada pengertian-pengertian korban diatas, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian/penderitaan bagi diri/kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk didalamnya adalah keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika

membantu korban mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi.

Pengertian kerugian (*harm*) menurut Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/34 Tahun 1985, meliputi kerugian fisik atau mental (*physical or mental injury*), penderitaan emosional (*emotional suffering*), kerugian ekonomi (*economic loss*), atau kerusakan substansial dari hak-hak asasi para korban (*substantial impairment of their rights*). (Theodora Shah Putri, hal 3 <<http://www.pemantauperadilan.com>>)

Lebih lanjut, korban kejahatan dapat pula diklasifikasikan berdasarkan sifatnya yaitu: adanya sifatnya individual (*individual victims*) dan kolektif (*collective victims*), korban kejahatan bersifat langsung yaitu korban kejahatan itu sendiri dan korban kejahatan yang bersifat tidak langsung (korban semu/abstrak) yaitu masyarakat, seseorang, kelompok masyarakat maupun masyarakat luas, selain itu kerugian korban juga dapat bersifat materiil yang lazimnya dinilai dengan uang dan yang bersifat imateriil yakni perasaan takut, sakit, sedih, kejutan psikis dan lain sebagainya.

Dalam perspektif normatif, pengertian korban dapat pula dilihat dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu: "Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana". Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi terhadap

Korban Pelanggaran HAM yang Berat, korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun.

Apabila memperhatikan beberapa definisi tentang korban di atas, terkandung adanya beberapa persamaan unsur dari korban, yaitu:

1. Orang (yang menderita);
2. Penderitaan yang bersifat fisik, mental, ekonomi ;
3. Penderitaan Karena perbuatan yang melanggar hukum;
4. Dilakukan oleh pihak lain.

2. Tipologi Korban

Perkembangan ilmu viktimologi selain mengajak masyarakat untuk lebih memperhatikan posisi korban juga memilah-milah jenis korban hingga kemudian muncullah berbagai jenis korban, menurut Mansur (2006 :49) yaitu sebagai berikut :

Jenis-jenis korban, antara lain :

- a. *Nonparticipating victims*, yaitu mereka yang tidak peduli terhadap upaya penanggulangan kejahatan.
- b. *Laten victims*, yaitu mereka yang mempunyai sifat karakter tertentu sehingga cenderung menjadi korban.

- c. *Procative victims*, yaitu mereka yang menimbulkan rangsangan terjadinya kejahatan.
- d. *Participating victims*, yaitu mereka yang dengan perilakunya memudahkan dirinya menjadi korban.
- e. *False victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena perbuatan yang dibuatnya sendiri.

Tipologi korban sebagaimana dikemukakan di atas, memiliki kemiripan dengan tipologi korban yang diidentifikasi menurut keadaan dan status korban, yaitu sebagai berikut :

- a. *Unrelated victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku, misalnya pada kasus kecelakaan pesawat. Dalam kasus ini tanggung jawab sepenuhnya terletak pada pelaku;
- b. *Provocative victims*, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban, misalnya pada kasus selingkuh, di mana korban juga sebagai pelaku.
- c. *Participating victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.
- d. *Biologically weak victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban.
- e. *Socially weak victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban.

- f. *Self victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri, misalnya korban obat bius, judi, aborsi, prostitusi.

Pengelompokan korban menurut Sellin dan Wolfgang (Muhadar, 2013: 39-40), yaitu sebagai berikut :

- a. *Primary victimization*, yaitu korban berupa individu atau perorangan (bukan kelompok).
- b. *Secondary victimization*, yaitu korban kelompok, misalnya badan hukum.
- c. *Tertiary victimization*, yaitu korban masyarakat luas.
- d. *No victimization*, yaitu korban yang tidak dapat diketahui misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu produksi.

Dilihat dari peranan korban dalam terjadinya tindak pidana, Stephen Schafer mengatakan pada prinsipnya terdapat empat tipe korban, yaitu sebagai berikut :

- a. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa, tetapi tetap menjadi korban

Untuk tipe ini, kesalahan ada pada pelaku.
- b. Korban secara sadar atau tidak sadar telah melakukan sesuatu yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan

Untuk tipe ini, korban dinyatakan turut mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan sehingga kesalahan terletak pada pelaku dan korban.

- c. Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban Anak-anak, orang tua, orang yang cacat fisik atau mental, orang miskin, golongan minoritas dan sebagainya merupakan orang-orang yang mudah menjadi korban. korban dalam hal ini tidak dapat disalahkan, tetapi masyarakatlah yang harus bertanggung jawab.
- d. Korban karena ia sendiri merupakan pelaku Inilah yang dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban. Pelacuran, perjudian, zina, merupakan beberapa kejahatan yang tergolong kejahatan tanpa korban. pihak yang bersalah adalah korban karena ia juga sebagai pelaku.(Mansur, 2006 : 50-51)

C. Kejahatan

1. Definisi Kejahatan

Istilah Kriminal sudah lazim digunakan dalam ilmu hukum. Kata Kriminal itu berasal dari kata *Crimen* yang berarti kejahatan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diadakan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran, namun dewasa ini pemisahan ini sudah susah dipertahankan lagi. Contoh ialah rancangan KUHP baru yang tidak mengenal pelanggaran.

Di Inggris dan Amerika digunakan istilah *Criminal act* dan *Criminal intent*. *Criminal Act*, yang menunjukkan sifat jahat dan tercelanya perbuatan,

jauh lebih tepat daripada *strafbaarfeit*, yang di Indonesia diterjemahkan oleh mayoritas sarjana dengan tindak pidana, tidak mungkin tindak dipidana.

Perkataan kejahatan menurut pengertian tata bahasa adalah perbuatan atau tindakan yang tercela oleh masyarakat misalnya pembunuhan, pencurian, pemalsuan surat-surat, penyerobotan yang dilakukan oleh manusia. Sebenarnya pengertian kejahatan sampai sekarang belum terdapat batasan yang tepat, yaitu pengertian kejahatan itu sendiri masih sangat tergantung pada siapa, di mana dan waktunya pengertian dikatakan.

Dengan perkataan lain, upaya untuk merumuskan atau mendefinisikan kejahatan dalam kriminologi hampir setara dengan bidang ilmu itu sendiri. Sampai sekarang belum ada kata sepakat di antara para kriminolog tentang definisi kejahatan. Hal ini sesuai dengan pendapat J.E. Sahetapy sebagai berikut :

Kejahatan mengandung konotasi tertentu, merupakan suatu pengertian dan penamaan yang relatif mengandung variabilitas dan dinamika serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku (baik aktif maupun pasif), yang dinilai oleh sebagian mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan anti sosial” (Muhadar, 2013 :25)

Akan tetapi untuk memudahkan uraian maka pengertian kejahatan sangat diperlukan, karena jika tidak diterapkan terlebih dahulu mengenai apa yang relevan, lebih-lebih apa yang penting. Disamping itu kejahatan merupakan sebagian dari masalah kehidupan manusia sehari-hari sehingga

harus diberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan kejahatan itu sendiri.

Menurut Sutherland (Muhadar,2013 :26) bahwa “ciri pokok dari kejahatan yakni perilaku yang dilarang oleh negara, oleh karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan pidana sebagai upaya pamungkas”. Menurut Richard Quine, bahwa “kejahatan adalah suatu rumusan tentang perilaku manusia yang diciptakan oleh alat-alat berwenang dalam suatu masyarakat yang secara politis terorganisasi, dengan begitu kejahatan adalah sesuatu yang diciptakan. Masih banyak lagi pendapat para sarjana hukum dan ahli kriminologi yang mencoba mendefinisikan kejahatan, baik yang merumuskannya terlepas dari sudut yuridis sebagaimana dikemukakan oleh Thorstein Sellin, bahwa kejahatan, adalah pelanggaran norma-norma kelakuan yang tidak harus terkandung di dalam hukum. Jadi singkatnya kejahatan hanyalah suatu penamaan saja.

1. Tinjauan Kejahatan Secara Formal Yuridis (Hukum Pidana)

Untuk memberikan pemahaman terhadap pengertian kejahatan secara formal yuridis, maka harus terlebih dahulu mengemukakan pengertian dari delik. Istilah delik adalah berasal dari bahan latin, yaitu *delicta*, *delictun*, yang dalam bahasa Belanda diistilahkan sebagai *Strafbaarfeit* .

Dari kata *Strafbaarfeit*, para pakar hukum pidana di terjemahkan dengan berbagai istilah dan perumusannya pun sesuai dengan sudut

pandang masing-masing menurut aliran-aliran dalam hukum pidana yang mereka anut. Ada yang menerjemahkan dengan istilah peristiwa pidana, tindak pidana, pelanggaran pidana, perbuatan pidana, tetapi ada pula yang memakai istilah dengan delik itu sendiri.

Moeliatno (Muhadar. 2013: 27) menerjemahkan *Strafbaarfeit* dengan perbuatan pidana yang mencakup pengertian kejahatan dan pelanggaran dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa Pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar perbuatan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana asal saja dalam pada itu diingat. Bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan saran-saran yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.

Untuk mengetahui bahwa suatu perbuatan termasuk delik atau perbuatan pidana, (kejahatan dan pelanggaran), maka dasarnya terkait pada asas legalitas (*nullum delictum*) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP pidana sebagai berikut :

Tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana secara tertulis yang ada terdahulu dari perbuatan itu.

Jadi perbuatan itu harus memenuhi unsur delik (kejahatan dan pelanggaran) yang dirumuskan dalam undang-undang hukum pidana dan apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka itu dikategorikan bukan

termasuk delik atau perbuatan pidana (kejahatan dan pelanggaran). Dengan demikian dapat pengertian kejahatan secara formal yuridis adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang diancam pidana oleh undang-undang.

2. Tinjauan Kejahatan Secara Sosiologi

Dari segi sosiologis, kejahatan juga merupakan obyek permasalahan yang senantiasa hadir dalam pembahasan. Berikut ini beberapa pendapat tentang pengertian kejahatan ditinjau dari segi sosiologis. Menurut Soeriono Soekanto (Muhadar, 2013 : 28) bahwa :

Pada dasarnya, problem-problem sosial menyangkut nilai-nilai sosial dan moral, problem-problem tersebut merupakan persoalan, oleh karena menyangkut tata kelakuan yang immoral, berlawanan dengan hukum dan bersifat merusak, oleh sebab itu problem-problem sosial tak mungkin ditelaah tanpa mempertimbangkan ukuran masyarakat mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang buruk.

Emile Durkheim, sebagaimana disitasi oleh Harnani berpendapat bahwa “kejahatan merupakan suatu gejala yang normal di dalam setiap masyarakat yang bercirikan heterogenitas dan perkembangan sosial dan oleh karena itu tidak mungkin dapat dimusnahkan sampai habis. Pandangan tersebut bahkan secara lebih tajam diungkapkan oleh Korn dan Mc. Corkle, yang dikutip oleh J.E. Sahetapy, bahkan “kejahatan bukan hanya sekedar gejala normal di setiap masyarakat, melainkan suatu hal yang tak dapat diletakkan sebagai tuntutan kompleks keadaan masyarakat dan kebebasan

individu”. Dari beberapa rumusan tersebut dapat dirangkakan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang anti sosial yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum pidana sehingga oleh negara ditentang dengan penjatuhan pidana. Jadi jelasnya secara sosiologi kejahatan merupakan suatu bentuk tingkah laku, ucapan, perbuatan yang menginjak-nginjak nilai-nilai, norma-norma atau adat istiadat yang hidup di dalam masyarakat yang secara ekonomis, politis dan sosial psikologis sangat merugikan umum.

2. Penggolongan Kejahatan

Kejahatan dapat digolongkan atas beberapa golongan berdasarkan beberapa pertimbangan :

a. Motif Pelakunya

Bonger membagi kejahatan berdasarkan motif pelakunya sebagai berikut:

- 1) Kejahatan ekonomi (*economic crime*), misalnya penyelundupan.
- 2) Kejahatan seksual (*sexual crime*), misalnya perbuatan zinah, pasal 283 KUHP.
- 3) Kejahatan politik (*political crime*), misalnya pemberontakan PKI, pemberontakan DI/TI, dll.
- 4) Kejahatan lain-lain (*miscelianeaeous crime*), misalnya penganiayaan, motifnya balas dendam.

b. Berdasarkan Berat/Ringan Ancaman Pidananya

- 1) Kejahatan, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam buku ke-II (dua) KUHP, seperti penganiayaan, pembunuhan, pencurian, dll. Golongan inilah dalam bahasa Inggris disebut *Felony*. Ancaman pidana pada golongan ini kadang-kadang pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara sementara.
- 2) Pelanggaran, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam buku ke-III (ketiga) KUHP, seperti saksi di depan persidangan yang memakai jimat pada waktu ia harus memberikan keterangan dengan bersumpah, dihukum dengan hukum kurungan selama-lamanya 10 hari atau denda. Pelanggaran di dalam bahasa Inggris disebut *Misdemeanor*. Ancaman hukumannya biasanya hukuman denda saja.

c. Kepentingan Statistik

- 1) Kejahatan terhadap orang (*crime against persons*), misalnya pembunuhan, penganiayaan, dll.
- 2) Kejahatan terhadap harta benda (*crime against property*), misalnya pencurian, perampokan, dll.
- 3) Kejahatan terhadap kesusialaan umum (*crime against public decency*) misalnya, perbuatan cabul.

d. Kepentingan Pembentukan Teori

Penggolongan ini didasarkan adanya kelas-kelas kejahatan. Kelas-kelas kejahatan dibedakan menurut proses penyebab kejahatan, cara melakukan kejahatan, tehnik-tehnik dan organisasinya dan timbulnya kelompok-kelompok yang mempunyai nilai-nilai tertentu pada kelas tersebut. Penggolongannya adalah:

- 1) *Professional Crime*, adalah kejahatan dilakukan sebagai mata pencarian tetapnya dan mempunyai keahlian tertentu untuk profesi itu.
Contoh : pemalsuan tanda tangan, pemalsuan uang dan pencopetan.
- 2) *Organized crime*, adalah kejahatan yang terorganisir. Contoh: pemerasan, perdagangan gelap narkoba, perjudian liar dan pelacuran.
- 3) *Occupational crime*, adalah kejahatan karena adanya kesempatan.
Contoh: pencurian di rumah-rumah, pencurian jemuran, penganiayaan dan lain-lain.

e. Unsur-Unsur Pokok Untuk Menyebut Sesuatu Perbuatan

Sebagai Kejahatan

Untuk menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan ada tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi. Ketujuh unsur tersebut adalah :

1. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (harm);

2. Kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Pidana. Contoh, misalnya orang dilarang mencuri, dimana larangannya yang menimbulkan kerugian tersebut telah diatur di dalam pasal 362 KUHP (asas legalitas);
3. Harus ada perbuatan (*criminal act*);
4. Harus ada maksud jahat (*criminal intent = mens rea*);
5. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat;
6. Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan.

D. Restitusi

Ganti Kerugian merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kejahatan. Hal ini di pandang perlu karena secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional. Oleh karena itu, masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius. Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius, dapat dilihat dari dibentuknya *Declaration of Basic Principal of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh PBB, sebagai hasil dari *The severnt United Nation Conggres on the Treatment of Offenders*, yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985. Dalam deklarasi PBB tersebut telah dirumuskan bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada korban yaitu: (Rena Yulia, 2010 : 58)

1. *Acces to justice and fair treatment;*
2. *Restitution;*
3. *Compensation; and*
4. *Assistance.*

Bentuk perlindungan lainnya yang diberikan terhadap korban menurut Undang-undang demi untuk memberikan rasa aman terhadap korban dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya yang sesuai dengan ketentuan. Perlindungan ini di berikan dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan.

1. Definisi Restitusi

Restitusi sendiri di definisikan sebagai ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, yang dapat berupa pengambilan harta milik, pembayaran ganti rugi untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian tindakan tertentu.
(pemerintahan.umm.ac.id/files/file/buat%20print.pptx)

Ganti kerugian memiliki ruang lingkup yang luas, tidak hanya diberikan oleh pelaku terhadap korban atau kepada korban salah tangkap dan lain sebagainya. Di dalam KUHAP mengatur beberapa macam ganti kerugian, antara lain: (Moch. Faisal Salam, 2001 : 347)

- 1) Ganti kerugian berdasarkan Pasal 95 dan Pasal 96 KUHAP akibat seseorang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan yang sah berdasarkan undang-undang, atau karena keliru orangnya atau salah menerapkan hukum.
- 2) Ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 98 sampai Pasal 101 KUHAP yaitu kerugian yang diderita oleh orang lain, maka hakim atas permintaan orang tersebut menerapkan untuk menggabungkan perkara gugutan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.
- 3) Ganti kerugian berdasarkan hasil peninjauan kembali (*Herziening*) karena ada bukti-bukti baru, dimana tuntutan ganti kerugian itu dikabulkan oleh Mahkamah Agung.

Dasar hukum penggabungan perkara gugatan ganti diatur dalam Pasal 98 KUHAP. Hal ini memudahkan dalam penyelesaian perkara pidana dan perkara gugatan ganti rugi sehingga korban yang dirugikan akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dapat mengupayakan pemulihan haknya untuk memperoleh ganti rugi melalui putusan hakim.

Berikut ini definisi-definisi sebagai pembeda dari ketiga komponen diatas, yaitu : (Rena Yulia, 2010 : 59-61)

a. Ganti rugi

Istilah ganti kerugian digunakan oleh KUHAP dalam Pasal 99 ayat 1 dan 2 dengan penekanan pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan atau korban. Dilihat dari kepentingan korban, dalam konsep ganti kerugian terkandung dua manfaat yaitu untuk memenuhi kerugian material dan segala biaya yang telah dikeluarkan dan merupakan pemuasan emosional korban. Sedangkan dilihat dari sisi kepentingan pelaku, kewajiban pelaku, kewajiban mengganti kerugian dipandang sebagai suatu bentuk pidana yang dijatuhkan dan dirasakan sebagai sesuatu yang konkrit dan langsung berkaitan dengan kesalahan yang diperbuat pelaku.

b. Restitusi (*restitution*)

Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban. Tolak ukur yang digunakan dalam menentukan jumlah restitusi yang diberikan tidak mudah dalam merumuskannya. Hal ini tergantung pada status sosial pelaku dan korban. Dalam hal korban dengan status sosial lebih rendah dari pelaku, akan mengutamakan ganti kerugian dalam bentuk materi, dan sebaliknya jika status sosial korban lebih tinggi dari pelaku maka pemulihan harkat serta nama baik akan lebih diutamakan.

c. Kompensasi

Kompensasi merupakan bentuk santunan yang dapat dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi. Adanya gagasan mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan berlandaskan pada komitmen kontrak sosial dan solidaritas sosial menjadikan masyarakat dan negara bertanggung jawab dan

berkewajiban secara moral untuk melindungi warganya, khususnya mereka yang mengalami musibah sebagai korban kejahatan. Kompensasi sebagai bentuk santunan yang sama sekali tidak tergantung bagaimana berjalannya proses peradilan dan putusan yang dijatuhkan, bahkan sumber dana untuk itu diperoleh dari pemerintah atau dana umum.

Gugatan ganti kerugian biasanya diajukan dalam peradilan. Dalam Pasal 98 ayat (2) KUHAP menentukan bahwa gugatan ganti kerugian hanya dapat dilakukan sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana.

Dalam Pasal 98 ayat (2) KUHAP tersebut juga bahwa jika penuntut umum tidak hadir, maka gugatan ganti kerugian diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusannya. Biasanya ketidak hadiran penuntut umum ialah dalam perkara cepat, contohnya gugatan ganti kerugian dalam perkara cepat ialah dalam pelanggaran lalu lintas jalan. (Jur. Andi Hamzah, 2011 : 209)

2. Dasar Hukum Restitusi

Pada umumnya masalah ganti kerugian dalam proses pidana berkenaan dengan penangkapan dan penahanan serta tindakan-tindakan lainnya yang bertentangan dengan hukum, yang di lakukan oleh para penegak hukum. Sedang ganti kerugian bagi mereka yang menjadi korban pelanggaran hukum pidana (*victim of crime*), biasanya dikategorikan sebagai masalah Perdata (Pasal 1365 BW). (Djoko Prakoso, 1988 :106)

Pada aturan dalam pasal 1365 KUHPerdara, yang berbunyi : “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Dalam hal perlindungan hukum kepada masyarakat yang mendapatkan kerugian bersifat materiil ataupun immaterial dapat di wujudkan dalam berbagai bentuk seperti pemberian Restitusi, Kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum

Dalam sistem pemberian kompensasi dan restitusi bagi korban, terdapat lima sistem,yaitu :

- 1) Ganti rugi (*damages*) yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses pidana. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana;
- 2) Kompensasi bersifat keperdataan, diberikan melalui proses pidana;
- 3) Restitusi bersifat perdata bercampur dengan sifat pidana, diberikan melalui proses pidana. Walaupun restitusi disini tetap bersifat keperdataan, namun tidak diragukan sifat pidananya. Salah satu bentuk restitusi menurut sistem ini adalah “denda kompensasi” (*Compensatory fine*). Denda ini merupakan “kewajiban yang bernilai uang” yang dikenakan kepada terpidana sebagai suatu bentuk pemberian ganti rugi kepada korban disamping pidana yang seharusnya diberikan;

- 4) Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara. Disini tidak mempunyai aspek pidana apapun, walaupun diberikan dalam proses pidana. Jadi, kompensasi tetap merupakan lembaga keperdataan murni, tetapi negaralah yang memenuhi atau menanggung kewajiban ganti rugi yang dibebankan pengadilan kepada pelaku. Hal ini merupakan pengakuan, bahwa negara telah gagal menjalankan tugasnya melindungi korban dan gagal mencegah terjadinya kejahatan;
- 5) Kompensasi yang bersifat netral, diberikan melalui prosedur khusus. Sistem ini diterapkan dalam hal korban memerlukan ganti rugi, sedangkan si pelaku dalam keadaan bangkrut dan tidak dapat memenuhi tuntutan ganti rugi kepada korban. pengadilan perdata atau pidana tidak berkompeten untuk memeriksa, tetapi prosedur khusus/tersendiri dan independen yang menuntut campur tangan negara atas permintaan korban.

kecendrungan pembuat undang-undang untuk menggali kembali nilai-nilai hukum yang (pernah) hidup, yang di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Pidana (selanjutnya disingkat dengan RKUHP) hal ini terlihat di dalam Pasal 60 RKUHP tentang pidana tambahan, yaitu:

- ke-1 Pencabutan hak-hak tertentu;
- ke-2 Perampasan barang-barang tertentu dan tagihan;

ke-3 Pengumuman putusan hakim,

ke-4 *Pembayaran ganti kerugian;*

ke-5 *Pemenuhan kewajiban adat;* (huruf miring dari penulis).

Pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian dan pemenuhan kewajiban adat ini merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi korban yang dirumuskan dalam *ius constituendum* yang diangkat dari konsep hukum adat.

Pengaturan restitusi secara formal dalam bentuk peraturan perundang-undangan, baik di dalam *ius constituendum* (antara lain dalam Pasal 60 ke-4 tentang pembayaran ganti kerugian) maupun dalam *ius constitutum* (antara lain adalah Bab XIII Pasal 98-101 KUHAP tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian), serta juga dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang dalam hal ini membedakan dua jenis hak korban. Korban kejahatan "konvensional" yang ternyata tidak berhak atas bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Hak ini hanya diberikan kepada korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Di samping itu, korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, melalui LPSK, berhak mengajukan kompensasi dan restitusi. Sedangkan korban kejahatan "konvensional" hanya berhak mengajukan restitusi saja.

Terhadap apa yang diuraikan di atas, adalah dalam rangka demi kepastian hukum. Akan tetapi dalam praktek kehidupan masyarakat, seperti telah diuraikan di atas, sistem hukum adat justru memberikan peluang untuk

melakukan perdamaian, sehingga dilihat dari perspektif hukum pidana positif, maka praktek-praktek yang demikian itu menjadi “keluar” dari jalur proses yang formal. Dengan demikian, untuk kejadian-kejadian tertentu perlu diteliti kembali, tentang bagaimanakah penerapan hukum (acara) pidana positif masih layak diberlakukan sehingga tujuan keadilan dan kepentingan perlindungan dapat dicapai.

Urgensi adanya penyelidikan dimaksud semakin jelas jika dikaitkan dengan pelanggaran yang mengakibatkan korban luka atau meninggal dunia, yang dalam prakteknya seringkali diikuti dengan pemberian santunan oleh pelaku kepada korban di luar proses peradilan pidana. Sedangkan dalam praktek Pengadilan Negeri sendiri, terhadap semua korban yang diakibatkan oleh pelanggaran lalu lintas, tidak diperoleh santunan, baik berupa sejumlah uang ganti kerugian maupun dalam bentuk perawatan atau fasilitas dari pihak pelaku. Sehingga dengan demikian harus ditetapkan, bahwa dalam hal-hal tertentu, penyelesaian di luar jalur formal justru dapat menciptakan dan melahirkan suatu keadilan bagi kedua belah pihak.

Sehubungan dengan pengaturan ganti kerugian yang harus dibayarkan oleh pelaku kepada korban, Sudarto berpendapat, bahwa pidana pengenaan kewajiban ganti kerugian yang dikenakan pada pelaku itu akan mempunyai arti apabila si pelaku mampu membayar. Apabila ia tidak mampu, dan dapat diperkirakan bahwa sebagian besar dari orang yang melakukan

perbuatan pidana itu adalah termasuk orang yang tidak mampu, dan terhadap hal ini perlu pula difikirkan jalan keluarnya.

Lebih lanjut Sudarto mengingatkan, di samping masalah kemampuan, perlu ditinjau pula makna dari pidana tambahan tersebut dalam rangka pemaknaan terhadap pidana pada umumnya.

(<http://zulakrial.blogspot.com/2012/09/dasar-pembenaran-konsep-restitusi.html>)

3. Mekanisme Pemberian Restitusi bagi Korban

1) Mekanisme Litigasi

1. Penggabungan Perkara

Tuntutan ganti kerugian yang perkaranya telah diajukan ke pengadilan sebagai akibat dilakukannya tindak pidana. Dengan demikian kita akan berbicara mengenai kemungkinan penggabungan perkara, yang telah diatur dalam XIII Pasal 98-101 KUHAP.

Pasal 98 KUHAP ini tidak saja memperhatikan hak dari pelaku tindak pidana, tetapi juga hak dari orang yang menderita kerugian: materiil” yang disebabkan karena dilakukannya suatu tindak pidana.

Penggabungan yang dimaksudkan di sini adalah penggabungan pemeriksaan perkara gugatan ganti rugi (yang bersifat perdata) dengan perkara pidana yang sedang berjalan, hal mana jelas bahwa perkara pidana

tersebutlah yang menjadi dasar tuntutan perdatanya dan diputus sekaligus dengan perkara pidananya.

Wahyu Afandi, S.H dalam salah satu tulisannya mengatakan sebagai berikut :

Karena perbuatan itu merupakan perkara pidana dan tuntutan ganti rugi hanya sekedar upaya memintas maka terpenuhinya tuntutan itu tergantung dari putusan pidananya, bila terdakwa atau Penuntut Umum menerima putusan, tuntutan ganti rugi biasa direalisasi, sebaliknya bila salah satu pihak atau kedua-duanya menolak putusan itu, tuntutan ganti rugi pun belum dapat direalisasi. (Djoko Prakoso, 1988 :109)

Dalam hal diintrodukirnya sebagai “upaya memintas”, maka penulis kurang sependapat, karena apakah hal tersebut telah diterima dan diperkenankan ataupun termasuk dalam sistem materiil hukum atau prinsip-prinsip hukum yang berlaku di negara kita.(Djoko Prakoso, 1988 : 109)

Bila dikatakan penggabungan tersebut sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagai termaktub dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, maka kiranya itulah yang lebih tepat.

Jadi kembali kepada pokok pembahasan, berdasarkan Pasal 98 ayat (1) KUHAP, maka kepada pihak yang menjadi korban suatu tindak pidana, diberikan kemungkinan untuk dalam waktu yang bersamaan dengan proses pemeriksaan perkara pidananya, sekaligus mengajukan tuntutan ganti rugi, tanpa perlu menunggu putusan perkara pidananya terlebih dahulu.

Selanjutnya mengenai syarat-syarat untuk melakukan penggabungan tersebut, diatur dalam Pasal 98 ayat (2), yaitu selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana dan dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, maka pengertian tidak hadirnya penuntut umum dalam perkara pidana ini, karena perkara tersebut diputus dengan acara pemeriksaan cepat (Pasal 205 KUHP dan seterusnya).

Sebagai kesimpulan dari Pasal 98 di atas, maka ketentuan tersebut mensyaratkan :

- a. Adanya permintaan dari yang dirugikan
- b. Benar-benar ada kerugian yang diakibatkan dari perbuatan/tindakan terdakwa.
- c. Permintaan tuntutan ganti rugi ini hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Putusan mengenai ganti rugi dengan sendirinya akan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, apabila putusan pidananya memperoleh kekuatan hukum yang tetap pula.

Dalam hal Pasal 100 KUHP mengatakan bahwa :

- (1) Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding.

(2) Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.

Ini menunjukkan kepada kita, bahwa penggabungan gugatan tersebut pada perkara pidananya bertujuan agar gugatan itu dapat diperiksa dan diputus sekaligus dengan perkara pidananya, sehingga dengan demikian dalam prosedur untuk beracara pun tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri. (Djoko Prakoso, 1988 : 111)

2. Mekanisme Melalui Putusan Hakim dalam Pidana Bersyarat

Dalam praktek di Pengadilan untuk kasus-kasus tertentu. Berdasarkan Pasal 14c KUHP mengenai lembaga hukuman bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*).

Hakim dapat menjatuhkan pidana bersyarat, yaitu di samping syarat umum, ditambah dengan syarat khusus berupa ganti kerugian “materiil” kepada korban pelanggaran hukum, tetapi hal ini terbatas kepada kasus pelanggaran dan kejahatan yang sifatnya ringan

3. Mekanisme LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban)

Mekanisme melalui LPSK diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 yang berbunyi sebagai berikut :

(1) Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa :

- a. Hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat:
 - b. Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggungjawab pelaku tindak pidana.
- (2) Keputusan mengganti kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam mengatur kompensasi dan restitusi terdapat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Beberapa pokok penting mekanisme pemberian restitusi yang terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban,

Pasal 21 : Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 24 : Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dinyatakan lengkap, LPSK segera melakukan pemeriksaan substansif. Pasal 25, ayat (1): Untuk keperluan pemeriksaan permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 24, LPSK dapat memanggil Korban, Keluarga, atau kuasanya, dan pelaku tindak pidana untuk memberikan keterangan; ayat (2) Dalam hal pembayaran Restitusi dilakukan oleh pihak ketiga, pelaku tindak pidana dalam memberikan keterangan kepada LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghadirkan pihak ketiga tersebut.

Pasal 27 ayat (1) : Hasil pemeriksaan permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 ditetapkan dengan keputusan LPSK, disertai dengan pertimbangannya; ayat (2): Dalam pertimbangan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai rekomendasi untuk mengabulkan permohonan atau menolak permohonan Restitusi.

Pasal 28 :

- (1) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pelaku tindak pidana dinyatakan bersalah, LPSK menyatakan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 kepada pengadilan yang berwenang.
- (2) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum tuntutan dibacakan, LPSK menyampaikan permohonan tersebut

beserta keputusan dan pertimbangan kepada penuntut umum.

- (3) Penuntut umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam tuntutan nya mencantumkan permohonan Restitusi beserta keputusan LPSK dan pertimbangannya.
- (4) Salinan surat pengantar penyampaikan berkas permohonan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan kepada Korban, Keluarga atau Kuasanya dan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga.

Pasal 29 :

- (1) Dalam hal LPSK mengajukan permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), pengadilan memeriksa dan menetapkan permohonan Restitusi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
- (2) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada LPSK dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penetapan.
- (3) LPSK menyampaikan salinan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Korban, Keluarga, atau kuasanya dan kepada pelaku tindak pidana

dan/atau pihak ketiga dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal menerima penetapan.

Pasal 30 :

- (1) Dalam hal LPSK mengajukan permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), putusan pengadilan disampaikan kepada LPSK dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal putusan.
- (2) LPSK menyampaikan salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Korban, Keluarga, atau kuasanya dan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal menerima putusan.

Pasal 31 :

- (1) Pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga melaksanakan penetapan atau putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal salinan penetapan pengadilan diterima.
- (2) Pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga melaporkan pelaksanaan Restitusi kepada pengadilan dan LPSK.
- (3) LPSK membuat berita acara pelaksanaan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Pengadilan mengumumkan pelaksanaan Restitusi pada papan pengumuman pengadilan.

Pasal 32 ayat (1) : Dalam hal pelaksanaan pemberian Restitusi kepada Korban melampaui jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), Korban, Keluarga, atau kuasanya melaporkan hal tersebut kepada Pengadilan yang menetapkan permohonan Restitusi dan LPSK; ayat (2) : Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera memerintahkan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga untuk melaksanakan pemberian Restitusi, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal perintah diterima.

4. Melalui Gugatan Perdata

Berbicara mengenai mengapa ada tuntutan ganti kerugian, maka hal ini tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan masalah lainnya, yaitu adanya perbuatan yang menyebabkan terjadinya kerugian, yang pihak lain menimbulkan kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut. Dengan demikian kita berbicara mengenai soal “tanggung jawab” atas perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Salah satu hal yang menonjol menyangkut masalah pemberian ganti rugi ini adalah terdapat atau tidaknya unsur kesalahan. (Djoko Prakoso , 1988 : 98)

Dalam bidang Hukum Perdata, maka hal ini antara lain di atur dalam pasal 1365 KUHPerdata, yang berbunyi “Tiap perbuatan melanggar hukum,

yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Biasanya berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara, jika seseorang telah melakukan suatu perbuatan melanggar hukum dan telah terbukti kesalahannya, maka terhadap dirinya dapat dilakukan penuntutan mengganti kerugian. (Djoko Prakoso, 1988 :102)

Berkaitan dengan hukum acara perdata, dalam pasal 118 HIR disebutkan gugatan diajukan di Pengadilan Negeri di mana tergugat (dalam hal ini Pelaku) berdomisili. Dengan ketentuan seperti ini dalam praktiknya akan ada kemungkinan kendala dikarenakan Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara pidana tidak berwenang mengadili gugatan.

Ketidakwenangan Pengadilan Negeri ini disebabkan adanya perbedaan dasar hukum acara yang digunakan dalam perkara pidana dengan gugatan ganti rugi. Berdasarkan hukum acara pidana, maka Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara pidana adalah Pengadilan Negeri tempat perkara pidana terjadi, sehingga apabila tempat perkara pidana terjadi bukan di wilayah yang sama dengan domisili/tempat tinggal pelaku maka gugatan ganti rugi tidak dapat diajukan di Pengadilan Negeri tempat perkara pidana diperiksa.

Apabila Pengadilan Negeri tempat perkara pidana diperiksa tidak memiliki kewenangan memeriksa gugatan ganti rugi, maka gugatan ganti rugi ditolak. Hal lain berkaitan dengan hukum acara perdata adalah kemungkinan

gugatan ganti rugi tidak dapat diterima apabila penggugat tidak bisa membuktikan atau memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat yang terkait dengan isu atau substansi gugatan ganti rugi yang meliputi :

- a. Harus ada unsur perbuatan melawan hukum seperti melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kesusilaan yang baik, bertentangan dengan kepatutan serta keharusan yang harus diperhatikan dalam pergaulan masyarakat
- b. Harus ada unsur kesalahan yang dilakukan oleh pelaku
- c. Harus ada unsur kerugian yang ditimbulkan baik berupa kerugian materiil maupun kerugian immateriil
- d. Harus ada unsur adanya hubungan kausal (sebab-akibat) antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan sehingga pelaku dapat diminta pertanggung jawabannya.

Adapun ini dari Gugatan Ganti Rugi tersebut adalah :

- a. Identitas para pihak (penggugat dan Tergugat) atau disebut juga *persona standi in judicio*, yang menerangkan nama, alamat, umur, pekerjaan para pihak.
- b. Posita yang merupakan duduk perkara atau alasan-alasan mengajukan gugatan, menerangkan fakta hukum yang dijadikan dasar gugatan atau disebut juga dengan *Fundamentum Petendi*.

- c. Tuntutan (Petitum), yaitu hal-hal apa yang diinginkan atau diminta oleh penggugat agar diputuskan, ditetapkan atau diperintahkan oleh hakim (Pasal 178 ayat 3 HIR). Misalnya pada gugatan ganti rugi terhadap pelaku dalam kecelakaan lalu lintas, tuntutan yang diajukan adalah pembayaran sejumlah uang atas kerugian materiil dan/atau immaterial yang diderita korban kecelakaan lalu lintas.

2) Mekanisme Non-Litigasi

Restitusi merupakan suatu alternatif penuntutan yang memberikan kemungkinan penyelesaian negosiasi antara pelaku tindak pidana dengan korban. Alternatif penyelesaian perkara (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) telah dikembangkan dalam hukum perdata, dan sebaliknya juga dapat diterapkan secara luas di bidang hukum pidana. Ide atau wacana dimasukkannya ADR dalam bidang hukum pidana antara lain terlihat dalam dokumen penunjang kongres PBB ke-9/1995 yang berkaitan dengan manajemen peradilan pidana (yaitu dokumen A/CONF. 169/6) diungkapkan perlunya semua Negara mempertimbangkan “*privatizing some law enforcement and justice functions*” dan ADR. ADR bila diterapkan dalam hukum pidana dapat berupa mediasi, konsiliasi, restitusi, dan kompensasi. (Barda Nawawi Arief, 2007 : 6-8)

Dalam perkara praktik penyelesaian perdamaian secara kekeluargaan dilakukan atau terjadi, karena pada umumnya pelaku atau keluarga pelaku

meminta kepada penyidik agar perkara tidak diproses lebih lanjut. Pihak pelaku/keluarga pada umumnya telah memberikan ganti rugi kepada pihak korban, sehingga hal ini sebagai upaya mengambil hati pihak korban agar tidak menuntut lebih. Pihak korban/keluarga korban menyatakan telah mengadakan pertemuan sendiri antara korban (keluarga korban) dengan pelaku (keluarga pelaku) dan korban membawa surat pernyataan tentang telah ada perdamaian antara korban dengan pelaku. Selanjutnya korban menyampaikan kepada penyidik bahwa telah ada penyelesaian untuk tidak dilanjutkan, atau dengan kata lain kasus dimohon agar dicabut.

Penyelesaian secara non-litigasi dalam perkara pidana merupakan jalur alternatif, di samping jalur utama yaitu : jalur litigasi. Jalur non-litigasi sebenarnya tidak terdapat dalam aturan pokok hukum acara pidana, yaitu KUHP. Namun demikian dalam kenyataannya keberadaan non-litigasi diakui oleh masyarakat sehingga digunakan. Sebagai salah satu cara penyelesaian perkara pidana. Ada beberapa hal yang menjadikan penyelesaian perkara pidana melalui jalur non-litigasi. Pertama, adalah adanya kesepakatan antara para pihak untuk menyelesaikan perkara pidana, baik melalui peradilan pada tahap pertama (kepolisian) maupun tidak melalui peradilan. Kedua, adanya kesepakatan pula menggunakan atau tidak menggunakan jasa seorang atau beberapa orang mediator. Ketiga, dalam proses itu terjadi negosiasi atau tawar menawar mengenai jumlah ganti rugi atau tindakan lain yang harus diberikan atau dilakukan oleh pelaku kejahatan

kepada pihak korban. proses negosiasi atau tawar menawar ini merupakan proses yang biasanya terdapat dalam hukum perdata. (<http://www.dinamiclaw.org/index.php/JDH/article/viewFile/100/79>)

Jika proses negosiasi tidak dapat dicapai kata sepakat masih di luar pengadilan dapat digunakan jasa pihak ketiga sebagai mediator. Mediator ini yang selanjutnya akan memandu atau mencari cara penyelesaian yang dapat diterima oleh masing-masing pendapat serta mewarkan jalan ke luar yang baik dan dapat ditempuh. Di dalam mediasi, mediatorlah yang mengotrol proses negosiasi, namun mediator tidak membuat keputusan dan hanya memfasilitasi saja. Jika mediasi gagal, maka perkara tersebut dapat dibiarkan saja sehingga tidak ada penyelesaian, dan dapat pula dilaporkan atau diadukan kepada kepolisian. Pihak kepolisian setelah menerima laporan, jika polisi tersebut termasuk yang kontra dengan penyelesaian melalui jalur non-litigasi, maka penyelesaian selanjutnya adalah sesuai dengan ketentuan KUHP, yaitu dilakukan pemeriksaan dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan. Apabila polisi yang menerima laporan termasuk yang pro dengan penyelesaian non-litigasi, maka dengan melihat karakteristik kasus yang dihadapi, maka polisi tersebut akan menawarkan kepada pihak-pihak yang berselisih untuk menyelesaikan secara damai atau kekeluargaan, dan polisi dapat sebagai mediator atau polisi menunjuk pihak lain menjadi mediator. (<http://www.dinamiclaw.org/index.php/JDH/article/viewFile/100/79>)

Jika proses mediasi berjalan dengan baik dan menghasilkan kesepakatan, maka perkara pidana tersebut selesai. Namun jika mediasi gagal, maka perkara selanjutnya diteruskan pada proses penyelesaian perkara melalui jalur litigasi. Hal ini berarti perkara tersebut dilanjutkan ke sidang persidangan di muka hakim.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis memilih penelitian dilaksanakan di Kabupaten Gowa, tepatnya didalam wilayah hukum Polres sungguminasa dan Pengadilan Negeri Sungguminasa di Kabupaten Gowa untuk mendapatkan informasi mengenai Restitusi bagi Korban Kejahatan (Suatu Tinjauan Viktimologi) yang didasari pada pertimbangan Penulis bahwa kasus kejahatan secara umum merupakan kasus yang sering terjadi dan mengakibatkan korban yang membutuhkan ganti kerugian (Restitusi) terhadap kerugian yang dialaminya, sehingga Penulis berharap akan mudah memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis ajukan.

B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan Penulis untuk memperoleh data dan informasi dalam penulisan ini dilakukan dengan 2 (dua) cara yakni melalui Metode Penelitian Lapangan (*Field Research*) dan Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu :

- a. Field Research (Penelitian Lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan Penulis melalui wawancara langsung dengan

pihak-pihak yang berkompeten (polisi) dan melalui kuesioner kepada masyarakat yang menjadi korban. Data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen, dan arsip-arsip yang diberikan oleh Pihak Kepolisian dan Pengadilan.

- b. Library research (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder lainnya, yakni dengan membaca dan menelaah berbagai bahasa pustaka dan mempelajari berkas perkara yang ada hubungannya dengan objek yang akan dikaji.

C. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan sebagai dasar untuk menunjang hasil penelitian adalah :

1. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten (polisi) dan melalui kuesioner kepada masyarakat yang menjadi korban.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan seperti dokumen, arsip-arsip dan termasuk pula literatur bacaan lainnya, peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

D. Teknik Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian akan dianalisis dan diolah dengan metode kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan. Kemudian disajikan secara deskriptif, guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian nantinya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Korban Kejahatan Dalam Rangka Pemenuhan Haknya

Untuk Mendapatkan Restitusi di Kabupaten Gowa

Kejahatan merupakan suatu hal yang dilakukan oleh seseorang/ atau banyak orang yang dapat merugikan orang lain, perbuatan yang disebut sebagai kejahatan selalu bersifat merugikan (materiil atau immateriil). Realitas yang terjadi hari ini membuka mata kita bahwa kejahatan tidak bisa lagi ditolerir dalam rangka menegakkan negara hukum.

Berangkat dari hal tersebut penulis melihat bahwa korban kejahatan dalam rangka pemenuhan haknya untuk mendapatkan restitusi di kabupaten gowa sering kali mengalami dinamika dan persoalan sosial masyarakatnya.

Maka dari itu dibutuhkannya perlindungan hukum terhadap korban kejahatan sebagai bagian perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan salah satunya melalui pemberian restitusi.

Dalam hukum pidana, terdapat ketentuan yang menyinggung masalah ganti rugi, misalnya dalam Pasal 14c KUHP. Apabila hakim menjatuhkan pidana percobaan maka disamping penetapan syarat umum bahwa terdakwa tidak akan melakukan tindak pidana, dapat pula ditetapkan syarat khusus bahwa terdakwa dalam waktu tertentu, yang lebih pendek dari masa percobaannya, harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang

ditimbulkan oleh tindak pidana itu. Dalam hal pemberian restitusi juga di atur didalam Pasal 98-101 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah pasal-pasal yang berkaitan dengan hak korban dalam menuntut ganti kerugian dengan cara penggabungan perkara. Mekanisme yang ditempuh adalah penggabungan perkara gugatan ganti kerugian pada perkara pidana. Penggabungan perkara ganti kerugian merupakan acara yang khas dan karakteristik, yang ada di dalam isi ketentuan dari KUHAP.

Dalam hal upaya korban mendapatkan restitusi korban kejahatan dapat menggunakan jalur litigasi dan non litigasi. Jalur yang sering kali digunakan oleh korban kejahatan adalah jalur non litigasi dengan cara meminta langsung ganti kerugian kepada tersangka atau dapat juga dikatakan penyelesaian melalui jalan kekeluargaan. Jika ditemukan hambatan melalui jalan kekeluargaan dapat pula menggunakan perantara pihak kepolisian sebagai penengah hukum untuk mendapatkan titik temu dalam perkara. Jalur litigasi dapat di tempuh korban apabila ditemukan jalan buntu sampai ke tahap pemeriksaan di pihak kepolisian, maka korban dapat meminta agar kasus tersebut dilanjutkan ke Pengadilan. Dalam proses di Pengadilan korban dapat meminta permohonan penggabungan perkara yang dimaksudkan dalam Pasal 98-101 KUHAP.

Setelah penulis melakukan penelitian terhadap kasus yang terjadi tiga tahun terakhir tidak menemukan korban kejahatan yang menempuh jalan

seperti mengajukan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian di Pengadilan untuk mendapatkan restitusi sebagai haknya sehubungan dengan salah satu perlindungan hukum terhadap korban. Hal tersebut disebabkan bukan karena korban tidak menginginkannya tetapi lebih memilih menggunakan jalan kekeluargaan dengan pemikiran akan lebih mudah dan tidak berbelit-belit dibandingkan proses persidangan.

Penulis menemukan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh korban kejahatan untuk mendapatkan restitusi, sebagai berikut :

- 1) Korban telah melaporkan peristiwa kejahatan yang dialaminya ke pihak kepolisian;
- 2) Korban menggunakan pendekatan dengan cara musyawarah (perdamaian);
- 3) Korban setelah melakukan musyawarah dan tidak menemukan titik temu untuk berdamai, perkara pidananya lanjut di proses pengadilan.

Selain itu ketika korban kejahatan telah melakukan berbagai upaya yang di atas dan telah mengikuti prosedural dari pihak kepolisian tidak lagi mengajukan permohonan ganti kerugian dengan cara Penggabungan Perkara dikarenakan tingkat pendidikan, pemahaman mereka akan hukum serta proses persidangan yang berbelit-belit membuat korban kejahatan berfikir untuk lebih memilih jalan kekeluargaan atau tidak melanjutkan perkara pidananya.

Berdasarkan penelitian dan pengambilan data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Sungguminasa dan Kepolisian (Polres) Gowa maka data hasil penelitian dapat ditunjukkan dari beberapa tabel dibawah ini.

Tabel 1
Jumlah Perkara Pidana Yang ditangani Pengadilan Negeri
Sungguminasa Tahun 2010-2012

No	Tahun	Jumlah	Persentase
1	2010	317	30,71%
2	2011	364	35,27%
3	2012	351	34,01%
	Jumlah	1.032	100%

Sumber : Pengadilan Negeri Sungguminasa

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat jumlah perkara pidana yang ditangani Pengadilan Negeri sungguminasa di Kabupaten Gowa mengalami peningkatan pada tahun 2011 dibanding tahun 2010. Pada tahun 2010 tercatat 317 (30,17%) kasus yang ditangani oleh pihak pengadilan sedangkan pada tahun 2011 tercatat 364 (35,27%) kasus. Kemudian di tahun berikutnya mengalami penurunan lagi yaitu 351 (34,01%) kasus yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa.

Table 2
Jenis Kejahatan Yang Telah di Putus Pengadilan Negeri
Sungguminasa Tahun 2010-2012

No	Jenis Tindak Pidana	Putusan Tiga (3) Tahun Terakhir			Jumlah	Persentase
		2010	2011	2012		
1	Kejahatan terhadap keamanan negara		4		4	0.4 %
2	Kejahatan terhadap ketertiban umum	10	35	18	63	6.3%
3	Kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang	2		2	4	0.4%
4	Kejahatan terhadap penguasaan umum		1		1	0.1%
5	Pemalsuan Surat	3	2	2	7	0.7%
6	Kejahatan terhadap asal-usul dan perkawinan	1	2		3	0.3%
7	Kejahatan Kesusilaan	3	23	25	50	5.0%

8	Kejahatan Perjudian		17	20	37	3.7%
9	Penghinaan	1	6	6	13	1.3%
10	Kejahatan terhadap kemerdekaan orang lain	15	12	1	28	2.8%
11	Kejahatan terhadap nyawa	4	9	16	29	2.9%
12	Penganiayaan	67	52	52	171	17%
13	Menyebabkan mati/luka karena alpa	15	28		43	4.3%
14	Pencurian	84	84	99	267	26%
15	Pemerasaan dan pengancaman	4	1		5	0.5%
16	Penggelapan	8	15	8	31	3.1%
17	Penipuan	7	10	5	22	2.2%
18	Menghancurkan atau merusak barang	9	6	5	20	2.0%
19	Penadahan	5	1	8	14	1.4%
20	Kejahatan Penerbitan dan pencetakan			1	1	0.1%
21	Tindak Pidana Korupsi	2	2		4	0.4%
22	Tindak Pidana Senjata	3	18	3	24	2.4%

	Api/Tajam					
23	Tindak Pidana Narkotika/Psikotropika	25	11	18	54	5.4%
24	Tindak Pidana Perlindungan Anak	16	13	23	52	5.2%
25	Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	10	9	8	27	2.7%
26	Tindak Pidana Lain, Psl. 55,50 UU No. 41/1999, Psl. 112(1) No. 35/2009	18	3	19	40	4.0%
	Jumlah				996	100%

Sumber : Pengadilan Negeri Sungguminasa

Pada gambar tabel di atas di jelaskan bahwa kasus pencurian memiliki persentase sebanyak 27 % selanjutnya kasus penganiayaan memiliki persentase sebanyak 17 % dan kasus penggelapan sebanyak 3.1 % kasus-kasus inilah yang penulis kembangkan dalam penelitian untuk mendapatkan penjelasan mengenai upaya korban kejahatan untuk mendapatkan restitusi yang merupakan hak korban kejahatan

Dengan berangkat dari tersebut diatas penulis telah menyebar kuesioner dan wawancara langsung dengan beberapa korban kejahatan penganiayaan, pengerusakan, pengeroyokan, pencurian, penggelapan dan kecelakaan lalu lintas .

Selain itu, disaat penulis mewawancarai seorang korban kejahatan yang menyelesaikan dengan melaporkan kejahatan yang dialaminya ke pihak kepolisian setelah dikroyok mendapatkan luka memar yang ditimbulkan oleh pelaku yang masih berstatus keluarga korban. Korban pengeroyokan yang bernama A. Mina umur 39 Tahun seorang Ibu Rumah Tangga yang beralamat di Jalan Nuri Kabupaten Gowa melaporkan kasus yang dialaminya di Polres Gowa. Setelah korban mendapatkan luka fisik yang telah berulang kali dilakukan oleh pelaku korban pun sudah tidak dapat memaafkan kelakuan pelaku yang sering kali ketika mengadakan pesta miras (minuman keras). Pada saat kejadian itu korban hendak memperingati pelaku mengadakan pesta miras tersebut tetapi ketika itu pelaku bersama kedua temannya memukul korban yang mengakibatkan memar pada muka, bengkak pada mata dan gigi korban terlepas satu setelah kejadian tersebut korban lalu pergi ke RS. Syech Yusuf untuk divisum lalu melaporkan kejadian yang dialami kepihak kepolisian pada saat dikantor polisi pelaku berniat ingin berdamai tetapi korban tidak ingin berdamai karena kejadian tersebut telah berulang kali dan perkarapun dilanjutkan hingga dijatuhkan pidana penjara 7 bulan terhadap ketiga (3) pelaku. Tidak hanya itu korban juga mengalami

tekanan dari orangtua pelaku dan ketika memberikan kesaksian korbanpun sempat diancam/ ditakut-takuti oleh polisi bahwa kalau saja korban bicara yang mengada-ada bisa saja dipenjara. Kisaran kerugian korban hampir mencapai Rp. 2.000.000,- disebabkan korban berobat jalan. Kejadian tersebut terjadi pada bulan Juli tahun 2012 pukul 20.30 WITA. Korban tidak mendapatkan biaya pengobatan tetapi korban sudah merasa puas setelah pelaku mendapatkan hukuman penjara.

Penulis juga sempat mewawancarai korban penggelapan, jadi awal kejadiannya terjadi pada bulan Oktober Tahun 2011 bertempat di BTN Ana Gowa . Kejadiannya korban memiliki motor cicilan di telfon oleh dealer motor tempat korban membeli kendaraan tersebut untuk menagih korban tetapi korban tidak memiliki uang untuk membayar dan korban meminta tenggang waktu selama 2 minggu kepada orang dealer tetapi sebelum masa tenggang tersebut habis, motor korban sudah dibawa oleh dealer tanpa memberi tahu korban dengan alasan bahwa korban telah memberikan motor tersebut kepada orang lain dan tidak membayar tagihan tersebut sehingga pihak dealer melelang dengan alasan tersebut diatas dan pihak finance membuat STNK selain yang dimiliki oleh korban untuk kepentingan lelang tersebut tetapi korban tidak menerima perlakuan dari pihak finance dan juga dealer tempat pembelian motor tersebut. Selanjutnya setelah korban mengalami kejadian diatas korban lalu melaporkan pihak finance karena telah menarik motor korban keddealer tanpa surat yang sah dan tanpa kehadiran korban,

pelaporan korban ke Polres Gowa pada bulan desember 2011 dan pada saat korban dan pihak dealer bertemu korban menuntut untuk dikembalikan motornya tetapi pihak dealer mengatakan bahwa motor dengan tipe tersebut sudah lama dan yang ada hanya tipe yang baru tetapi korban mau motor yang sama dengan miliknya tetapi tidak dilanjutkan atau tidak dihiraukan oleh pihak dealer lalu korban mengajukan tuntutan keduanya korban meminta diganti kerugiannya sesuai yang dideritanya dan pihak dealer menyetujui dengan memberikan dana penggantian kerugian sebanyak 4.000.000 rupiah kepada korban dan tidak panjang lebar lagi korban menerima etikat baik pihak dealer tetapi sebelum itu pihak dealer telah ditahan 1 hari oleh pihak kepolisian karena sudah beberapa kali dilancarkan surat kepihak dealer tersebut tetapi tidak pernah hadir untuk memberikan keterangan. Setelah penggantian kerugian tersebut korban yang bernama Nurdianti mencabut laporannya dan tidak melanjutkannya ke pengadilan sesuai kesepakatan dengan pihak dealer korban yang bernama Nurdianti umur 33 Tahun yang bekerja sebagai Honorer di Dinas Kesehatan. Korban yang diwakili oleh pihak kepolisian memilih jalan damai dengan pelaku karena pelaku telah beritikad baik untuk mengganti kerugian yang di derita korban dan tidak ingin merusak hubungan dengan siapapun.

Fenomena kejahatan di Kabupaten Gowa terhadap Korban Kejahatan juga berkaitan erat dengan latar belakang pendidikan korban. Peranan tingkat pendidikan tersebut dihubungkan dengan ketidaktahuan masyarakat

terhadap Haknya dalam proses Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian, dan untuk lebih spesifiknya penulis gambarkan pada tabel dibawah ini :

Table 3

Data Tingkat Pendidikan Korban Kejahatan Di Kabupaten Gowa

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase
1	Tidak Tamat SD	1	3.33 %
2	Sekolah Dasar	7	23.33%
3	SMP	4	13.33%
4	SMA	15	50 %
5	Strata 1	3	10%
Jumlah		30	100%

Sumber : Data diolah.

Dalam tabel di atas, tampak bahwa korban kejahatan di Kabupaten Gowa yang paling banyak adalah yang hanya sampai tingkat SMA (50 %), lalu diikuti dengan yang hanya sampai pada tingkat SD (23.33 %) , kemudian yang hanya sampai pada tingkat SMP (13.33 %), kemudian yang hanya sampai pada S1 (10 %) dan yang tidak tamat SD (3.33 %). Dari jumlah korban total 30 (tiga puluh) korban kejahatan, yaitu terdapat 1 orang yang tidak tamat Sekolah Dasar (SD), 7 (Tujuh) orang hanya sampai pada tingkat Sekolah Dasar (SD), 4 (empat) orang tamatan Sekolah Menengah Pertama

(SMP) , 15 (lima belas) orang tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan 3 (tiga) orang lainnya merupakan Tamatan Strata satu (S1).

Table 4

Jumlah Data Yang Memilih Perdamaian Melalui Litigasi dan Non Litigasi

Jalur Perdamaian	Jumlah	Presentase
Litigasi	0	0%
Non Litigasi	30	100%
Jumlah	30	100 %

Sumber : data diolah dari kuisioner

Pada tabel di atas, tampak dengan jelas bahwa dari 30 (tiga puluh) orang korban kejahatan tersebut semuanya memilih jalur perdamaian non litigasi di karena untuk mengupayakan ganti kerugian melalui pengadilan (Litigasi) prosesnya terlalu berbelit-belit dan memerlukan waktu yang lama.

Table 5

Responden dari hasil Kuisener Korban Kejahatan

No.	Nama Korban	Jenis Kejahatan	Perkara di lanjutkan		Proses Restitusi
			Ya	tidak	

1	Muhadong	Penggelapan		✓	melalui perdamaian dan pelaku mengganti kerugian tetapi tidak sesuai dengan kerugian yang diderita korban
2	Nurdianti	Penggelapan		✓	Melalui perdamai diwakili oleh polisi dan ganti rugi yang diberikan sesuai
3	Hj.Hasmani	penggelapan	✓		Telah melaporkan kepolisian tetapi pelaku tidak mengganti kerugian dan telah menjadi tahanan selama 2 minggu
4	A.mina	penggeroyokan	✓		Melalui pengadilan dan pelaku

					dipidana 7 bulan dipenjara
5	Zulkarnaen	penganiayaan		✓	Tidak mendapatkan ganti kerugian karena setelah dilaporkan pelaku sudah tidak ditemukan
6	Jaka sahur	Penganiayaan		✓	Melalui perdamaian dan tidak mendapatkan ganti kerugian karena korban masih memikirkan hubungan baiknya dengan pelaku (keluarga)
7	Harry Jauri	Penganiayaan	✓		Pelaku dipidana selama 6 bulan dipenjara karena pada saat kejadian

					pelaku sedang tidak sadar (mabuk) dan tidak mengganti kerugian
8	Dg. Sungguh	Pencurian	✓		Tidak menuntut lagi karena pelaku sudah dipenjara selama 1 tahun
9	Dg. Karannuang	pencurian		✓	Melalui perdamaian karena tidak ingin berbelit-belit dan karena pelaku dan korban sudah saling memaafkan
10	Dg sera	Pencurian		✓	Damai karena pelakunya tergolong orang yang tidak mampu
11	Suherman	Pencurian	-	-	Tidak melaporkan

					kekepolisian karena pelaku masih keluarga dekat
12	Karaeng bollo	Pencurian	-	-	Tidak melaporkan kepolisi karena pelaku orang tidak mampu
13	Hj. Salma	Kecelakaan Lalu lintas	-	-	Melalui perdamaian karena derita yang dialami ringan dan tidak ingin berbelit- belit
14	Fitri	Kecelakaan lalu lintas	-	-	Tidak melaporkan kepolisi karena tidak diketahui siapa yang salah karena kejadian yang berlangsung cepat

15	Arifin	Kecelakaan lalu lintas	-	-	Tidak melaporkan karena atur damai dan tidak ingin terlibat dengan hukum
16	Yuliana syam	Kecelakaan lalu lintas	-	-	Damai karena pelaku dan korban sama-sama menderita kerugian dan tidak ingin memperpanjang masalah
17	Dg. Baji	Kecelakaan lalu lintas	-	-	Polisi dengan sendirinya langsung datang dan proses penyelesaiannya melalui perdamai karena pelaku bersedia menanggung

					segala kerugian korban
18	Inisial Mumut	Kecelakaan lalu lintas		✓	Melalui perdamai karena korban telah meninggal dunia dan tidak mempercayai lagi lembaga penegak hukum/institusi pengadilan
19	Syukur	Kecelakaan lalu lintas	-	-	Tidak melaporkan kepolisi karena pelaku telah beritikad baik mengganti kerugian yang korban derita
20	Jaya	pengerusakan	-	-	Tidak menuntut ganti kerugian karena pelaku tergolong orang

					yang tidak mampu
21	Adam	Penipuan		✓	Tidak menuntut karena korban tergolong orang yang mampu dan sibuk
22	Karaeng nurung	Penipuan		✓	Damai karena pelaku teman sendiri dan tidak ingin proses menjadi berbelit- belit
23	Nursalam	pemerasan	-	-	Tidak melaporkan karena percaya akan hukum karma dan tidak menuntut ganti rugi karena ada hikmahnya

Sumber : Kuisener Korban Kejahatan

Berdasarkan tabel yang diatas, tampak jelas kita lihat bahwa hampir semua responden korban kejahatan memilih untuk menyelesaikan masalah

yang mereka hadapi dengan jalur non litigasi. hal ini disebabkan karena jalur non litigasi tidak berbelit-belit dan tidak memakan waktu yang lama lebih mudah dari pada harus berurusan sampai ke Pengadilan. Selain itu hal lain yang menyebabkan lebih banyak korban memilih jalur non litigasi ialah berdasarkan ketidaktahuan masyarakat awam tentang adanya Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian.

B. Faktor-Faktor Yang Menghambat Upaya Pemberian Restitusi bagi Korban di Kabupaten Gowa

Setelah melakukan berbagai upaya korban juga tidak terlepas dari berbagai hambatan untuk mendapatkan restitusi, tidaklah mudah karena harus melalui proses yang panjang. Hal ini yang dapat menjadi penyebab terhadap korban kejahatan untuk mendapatkan restitusi sebagai haknya.

Di bawah ini merupakan faktor-faktor yang menjadi hambatan terhadap pemberian restitusi bagi korban kejahatan di Kabupaten Gowa, yang penulis akan perlihatkan dalam bentuk table di bawah ini :

Table

Faktor-Faktor Yang menjadi Hambatan Pemberian Restitusi bagi Korban Kejahatan di Kabupaten Gowa

No.	Responden	Ketidaktahuan Masyarakat Tentang Penggabungan Perkara		Jumlah Ganti Kerugian		Proses yang Berbelit-Belit	
		Tahu	Tidak Tahu	sesuai	Tidak sesuai	Litigasi	Non Litigasi
1	Muhadong		✓		✓	✓	
2	Nurdianti		✓	✓		✓	

3	Hj.Hasmani		✓		✓	✓	
4	A.mina		✓		✓	✓	
5	Zulkarnaen		✓		✓	✓	
6	Jaka sahur		✓		✓	✓	
7	Harry Jauri		✓		✓	✓	
8	Dg. Sungguh		✓		✓	✓	
9	Dg. Karannuang		✓		✓	✓	
10	Dg sera		✓		✓	✓	
11	Suherman		✓		✓	✓	
12	Karaeng bollo		✓		✓	✓	
13	Hj. Salma	✓			✓	✓	
14	Fitri		✓	✓		✓	
15	Arifin		✓		✓	✓	
16	Yuliana syam	✓			✓	✓	
17	Dg. Baji		✓	✓		✓	
18	Inisial Mumut	✓			✓	✓	

19	Syukur		✓	✓		✓	
20	Jaya		✓		✓	✓	
21	Adam		✓		✓	✓	
22	Karaeng nurung		✓		✓	✓	
23	Nursalam	✓			✓	✓	
24	Akil		✓		✓	✓	
25	Kama		✓		✓	✓	
26	Mahatir		✓		✓	✓	
27	Abd. Haris	✓			✓	✓	
28	Sri Rahayu		✓		✓	✓	
29	Sarimin		✓	✓		✓	
30	Yusni		✓		✓	✓	
Jumlah		5	2 5	5	25	30	-
Persentase		16.67 %	83.33%	16.67%	83.33%	100 %	-

Sumber : data diolah dari Kuisisioner

Berdasarkan tabel di atas, kita ketahui bahwa dari 30 (tiga puluh) orang responden hanya 5 (lima) orang di antaranya yang tahu mengenai Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dan dari 30 (tiga puluh)

orang Tersebut 5 (lima) orang diantaranya yang mendapatkan ganti kerugian dari pelaku sesuai dengan kerugian materiil yang dideritanya. Dari data tersebut diatas kita ketahui bahwa dalam proses untuk mendapatkan restitusi korban kejahatan terhambat oleh ketidaktahuan mengenai penggabungan perkara dan juga jumlah yang diberikan oleh pelaku terhadap kerugian korban tidak sesuai dengan penderitaan yang dialami korban kejahatan dan dari data diatas kita ketahui bahwa 30 (tiga puluh) responden mengatakan proses litigasi yang lama dan berbelit-belit merupakan penghambat terpenuhinya ganti kerugian bagi korban kejahatan.

Hal tersebut di atas akan diperkuat dalam hasil wawancara penulis kepada salah seorang Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang bernama Bapak Yoga D.A Nugroho, S.H., M.H. Beliau memaparkan bahwa salah satu hambatan yang dihadapi korban kejahatan untuk mendapatkan restitusi adalah faktor ketidaktahuan korban terhadap haknya. Masyarakat awam kebanyakan tidak mengetahui tentang Penggabungan Perkara Ganti Kerugian.

Hambatan lain yang dihadapi adalah dalam penyelesaian perkara jumlah ganti kerugian yang didapatkan terkadang tidak sesuai dengan kerugian yang dialami atau diderita oleh korban kejahatan. Selain itu, proses yang panjang dan berbelit-belit juga menjadi kendala untuk korban melanjutkan perkara pidananya hingga ke Pengadilan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam bab terakhir ini, penulis akan memberikan kesimpulan dari berbagai permasalahan yang telah dihadapi korban kejahatan yang telah dibahas di bab sebelumnya. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut :

1. Upaya yang dilakukan oleh korban kejahatan dalam rangka pemenuhan haknya untuk mendapatkan restitusi, yakni melalui mediasi (Jalan Kekeluargaan) antara pelaku dan korban yang di bantu oleh pihak kepolisian. Pranata hukum pidana telah menyediakan Pasal 98-101 KUHAP sebagai media untuk memperjuangkan hak korban menuntut ganti kerugian. Tetapi dalam implementasinya terdapat banyak kendala, sehingga korban lebih memilih jalur mediasi. Penyelesaian dengan cara mediasi (Jalan Kekeluargaan) dari 30 responden korban kejahatan 100 % memilih jalur ini karena membuat korban kejahatan dengan mudah meminta ganti kerugian yang telah dideritanya.
2. Hambatan yang dihadapi oleh korban kejahatan dalam pemenuhan restitusi di kabupaten gowa, antara lain ketidaktahuan masyarakat awam terkait haknya untuk

mendapatkan restitusi akibat kejahatan yang dialaminya dapat ditempuh dengan penggabungan perkara dalam proses di pengadilan, seperti yang kita ketahui bersama ketika korban ingin mengajukan permohonan restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20-33 pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 yang memuat kelengkapan dan persyaratan korban untuk mengajukan permohonan ganti kerugian (restitusi) membutuhkan proses yang panjang. Untuk itu, korban merasa sulit untuk menempuh proses tersebut dikarenakan terlalu berbelit-belit dan memakan waktu yang lama sehingga korban kejahatan berfikir untuk tidak menggunakan haknya melalui penggabungan perkara.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas yang telah penulis kemukakan, adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan skripsi ini adalah :

1. Bagi aparat penegak hukum, diharapkan untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai adanya penggabungan perkara gugatan ganti kerugian yang dapat ditempuh untuk memperjuangkan haknya sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum bagi korban .

2. Cara yang lebih efektif agar ganti kerugian dapat diperoleh korban secara memadai sebakinya dengan proses yang cepat dan tidak berbelit-belit akan memudahkan korban mendapatkan haknya.
3. Penyelesaian yang sering ditempuh korban kejahatan untuk mendapatkan hak restitusinya dengan cara kekeluargaan tentunya lebih baik dan cepat ketika ada kesepakatan tentang jumlah ganti rugi dan waktu pembayarannya. maka dari itu, dibutuhkan peran aktif pihak kepolisian untuk menjadi mediator.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam A.S. 2010. *Pengantar Kriminologi*, Anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia)
- Angkasa. 2004. *Kedudukan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi, Universitas Diponegoro : Semarang
- Chaeruddin & Syarif Fadillah. 2004. *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi & Hukum Pidana Islam*, Grhadhika Press : Jakarta
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*
- Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta
- Gosita, Arif. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo : Jakarta
- Hamzah, Andi. 2011. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika : Jakarta
- Muhadar. 2013. *Korban Pembebasan Tanah Perspektif Viktimologis*, Rangkang Education : Yogyakarta
- Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti : Bandung
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro: Semarang
- Mulyadi, Lilik. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*. Djambatan : Jakarta

- Nawawi Arief, Barda. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti : Bandung
- Topo Santoso, *Kriminologi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta., 2007
- Sunarso, Siswanto. 2012. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika : Jakarta
- Soeharto. 2007. *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama : Bandung
- Soesilo, R. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya*, Politeia : Bogor
- Yulia, Rena. 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Cetakan Pertama. Graha Ilmu : Yogyakarta.
- Zakariah Idris, dkk. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI : Jakarta

Peraturan Perundang-undangan

- Solahuddin. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, & Perdata (KUHP, KUHPA, & KUHPdt)*, Jakarta, Penerbit : Visimedia:Jakarta
- Undang-undang Republik Indonesia No 13 tahun 2006 tentang *Perlindungan Saksi dan Korban*

Undang-undang Republik Indonesia No 39 tahun 1999 tentang *Hak Asasi*

Manusia

Undang-undang Republik Indonesia No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan

Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-undang Republik Indonesia No 27 Tahun 2004 Tentang *Komisi*

Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2002 Tentang *Tata Cara Perlindungan*

Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia

yang Berat.

Peraturan Pemerintah No 44 tahun 2008 tentang *Pemberian Kompensasi,*

Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban

Sumber Internet

<http://bukuonline.doc/publicity-zakariah> idris dkk, 1988, Pencegahan

Kenakalan Remaja, IPH Bandung

[http://belajarkukumpidana.blogspot.com/2009/05/urgensi-penerapan-mata-](http://belajarkukumpidana.blogspot.com/2009/05/urgensi-penerapan-mata-kuliah.html)

[kuliah.html](http://belajarkukumpidana.blogspot.com/2009/05/urgensi-penerapan-mata-kuliah.html)

<http://bukuonline.doc/publicity> Soerjono Soekanto, 1981. *Kriminologi Suatu*

Pengantar, Ghalia Indonesia, Jakarta

<http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/2s1hukum/206712003/bab2.pdf>

<http://www.pemantauperadilan.com>

<http://pemerintahan.umm.ac.id/files/file/buat%20print.pptx>

<http://www.researchgate.net/publication/50382054> RESTITUSI DAN KOMPENSASI TERHADAP KORBAN KEJAHATAN DALAM PRESPEKTIF KEBAJAKAN KRIMINAL

<http://www.swd.gov.hk/vs/doc/publicity/law%20It%20Matters%20you%20%28Indonesia%20version%pdf>